



LAMPIRAN

**Pedoman Wawancara
Untuk Aparat Kepolisian
Polwiltabes dan Polres**

Nama :

Jabatan :

Hari/ Tanggal/ Jam :

PERILAKU POLISI YANG MENYIMPANG

1. Apa yang melatarbelakangi terjadinya perilaku menyimpang Polisi ?
2. Bagaimana tanggapan Polisi tentang beratnya bentuk penyimpang perilaku Polisi?
3. Apa yang menyebabkan perilaku Polisi yang menyimpang?
4. Bagaimana tanggapan / respon Polisi terhadap hukuman yang diberikan perilaku menyimpang dalam lembaga POLRI?
5. Bagaimana tanggapan Polisi tentang Keberadaan UU no. 28 Tahun 1997?
6. Bagaimana tanggapan Polisi mengenai Pengaruh Keberadaan UU No.28 Tahun 1997 terhadap sikap militer Polisi?

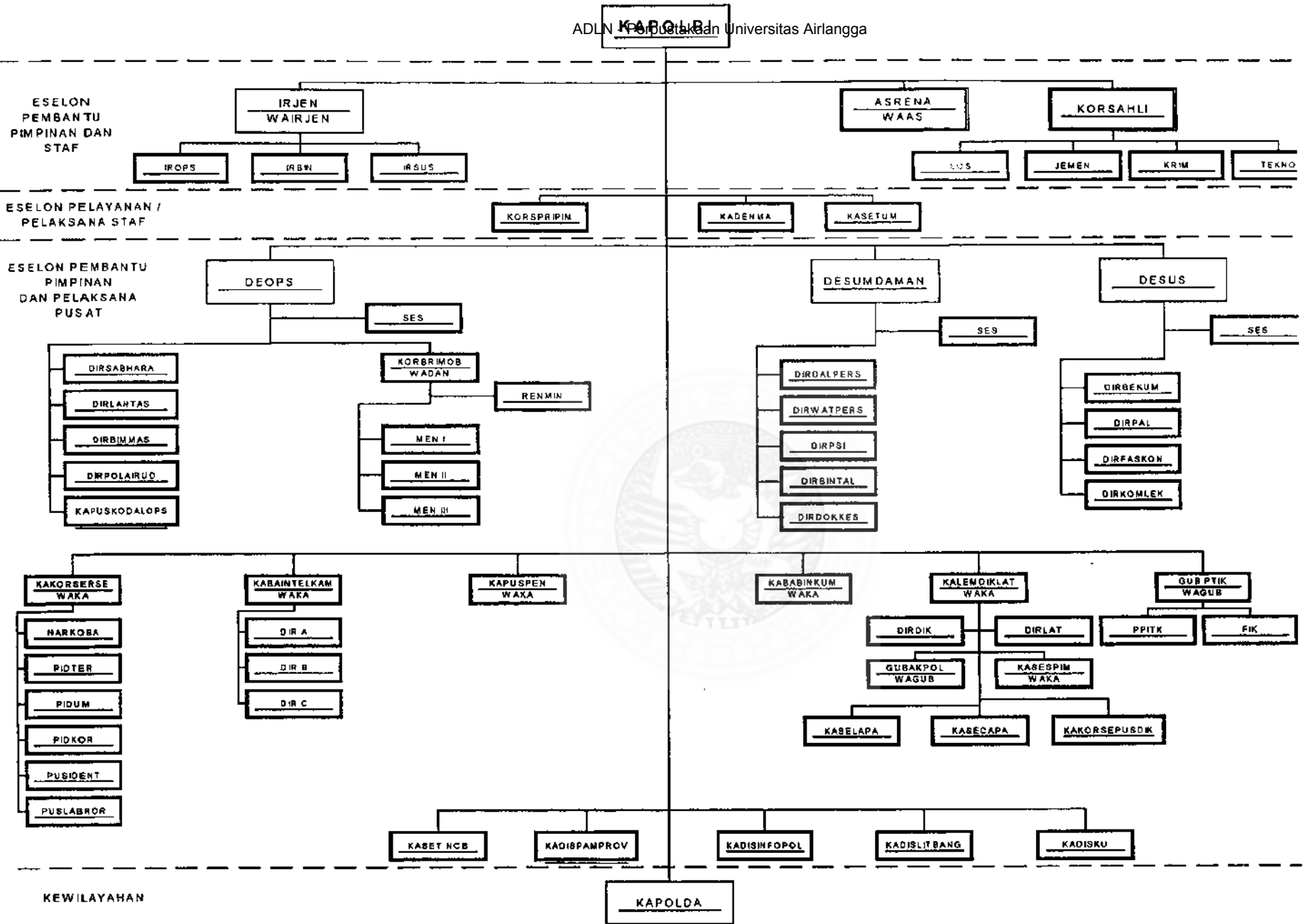
KONTROL MASYARAKAT

7. Adakah bentuk kontrol masyarakat terhadap Polisi ?
8. Adakah bentuk kontrol sosial terhadap Polisi ?
9. Perlukah dibentuk wadah aspirasi kontrol masyarakat antara Polisi dan masyarakat dalam bentuk pengamanan masyarakat?
10. Sejauh mana pelaksanaan kontrol masyarakat terhadap Polisi?
11. Bagaimana pelayanan Polisi dalam menangani kasus-kasus kriminal ?

12. Adakah perubahan dalam kinerja Polisi selama ini?
13. Bagaimana pendapat Polisi tentang sikap masyarakat?
14. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam rangka membantu tugas Polisi?
15. Se jauh mana upaya-upaya peningkatan kontrol sosial terhadap Polisi?

REKRUITMEN YANG LONGGAR

16. Bagaimana kinerja Polisi dalam proses rekrutmen selama ini?
17. Bagaimana proses seleksi rekrutmen calon anggota Polisi?
18. Adakah perubahan pola rekrutmen dari dulu hingga sekarang (tahun 1998)?
19. Sudah mendasarkah perubahan pola rekrutmen pada tahun 1999?
20. Sudah sesuaikah prosedur yang dilakukan pada perekrutan calon anggota Polisi?

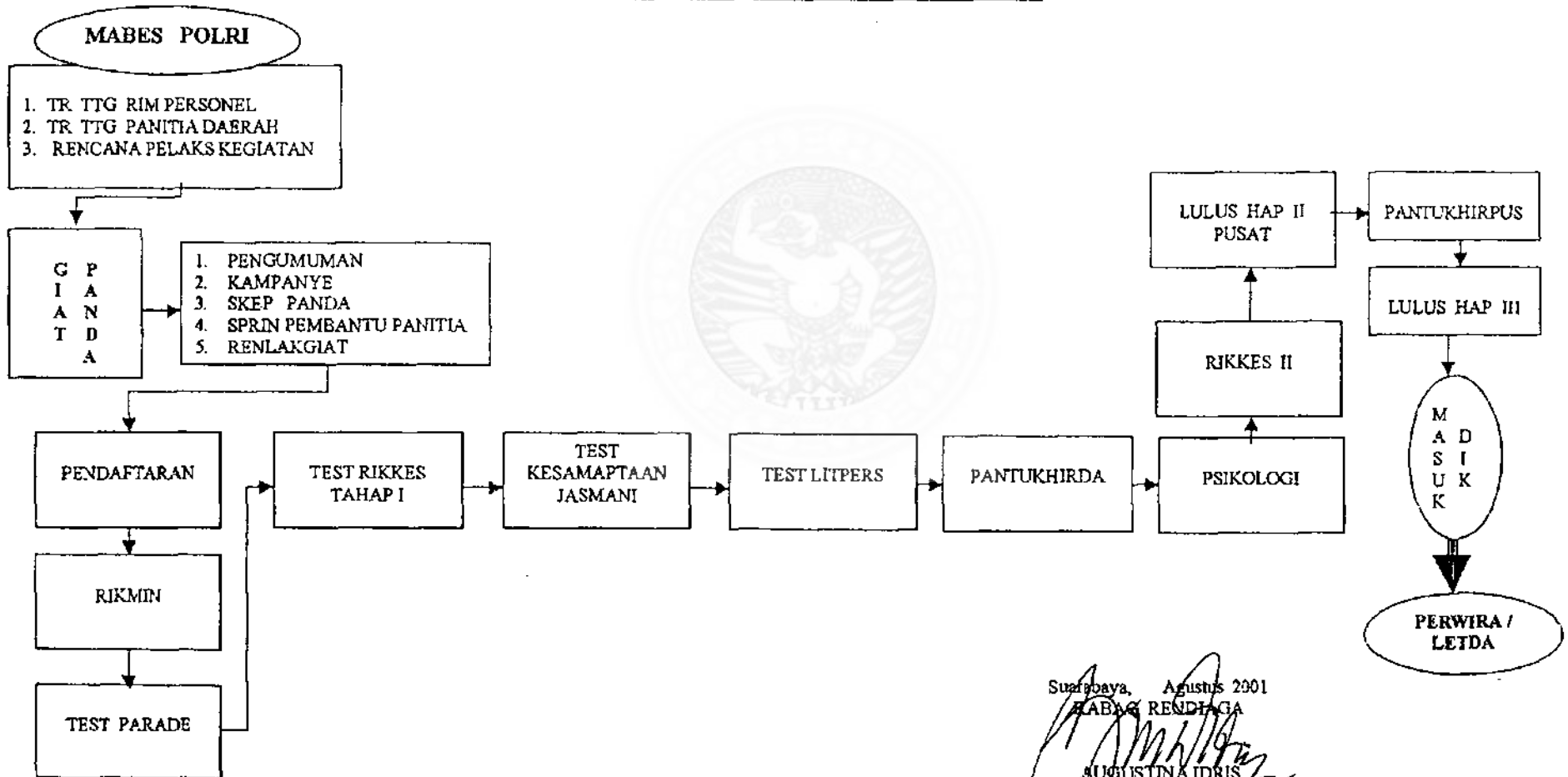


KEWILAYAHAN

KAPOLDA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR

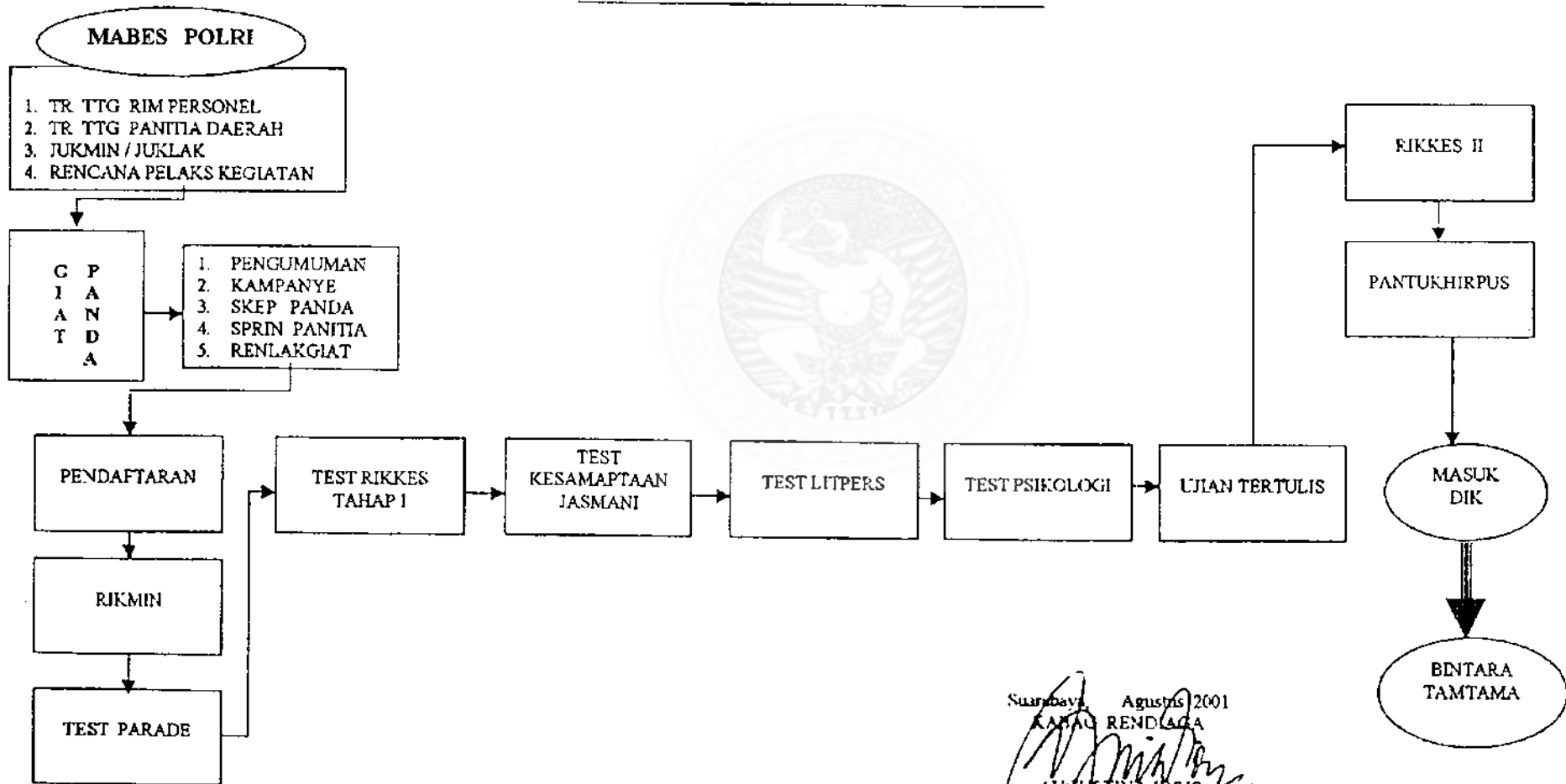
**MEKANISME PENERIMAAN
PERSONEL POLRI PPSS / AKPOL
POLDA JATIM**



Suarabaya, Agustus 2001
LABANG RENDIAGA
AUGUSTINA IDRIS
AKBP NRP. 53080137

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR

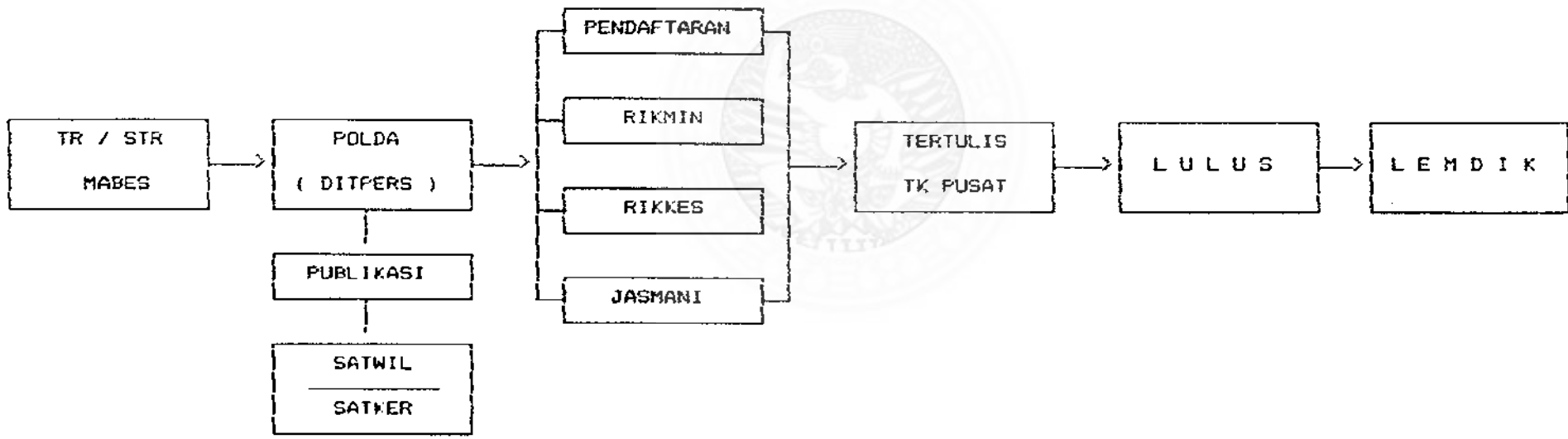
**MEKANISME PENERIMAAN
PERSONEL POLRI BINTARA / TAMTAMA
POLDA JATIM**



Suarabaya, Agustus 2001
KAPAU RENDAGA
Augustina Idris
AUGUSTINA IDRIS
AKIP NRP. 53080137

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
DIREKTORAT PERSONEL

ALUR GIAT SUBBAG SELEKSI BAG DALKAR
DALAM RANGKA DIXTUK & DIKBANG



NOMOR 28 TAHUN 1997
TENTANG
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional di bidang hukum adalah terbentuk dan berfungsinya sistem hukum nasional yang mantap, bersumberkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku, yang mampu menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum serta untuk memantapkan penyelenggaraan pembinaan keamanan umum dan ketentraman masyarakat dalam sistem keamanan dan ketertiban masyarakat swakarsa dengan berintikan Kepolisian Negara republik Indonesia sebagai alat negara penegak hukum yang profesional, maka dianggap perlu untuk memberikan landasan hukum yang kukuh dalam tata susunan tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik In-

Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan :

1. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif;
3. Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sifatnya mengikat seluruh warga masyarakat dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

4. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat;
5. Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas demi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat serta tercapainya tujuan pembangunan nasional;
6. Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan;
7. Penyidikan adalah serangkaian penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang;
8. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan;
9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dapat disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan undang-undang ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing;
10. Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang;

11. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;
12. Menteri adalah Menteri Pertahanan Keamanan Republik Indonesia;
13. Panglima adalah Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Pasal 2

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, terselenggaranya fungsi pertahanan keamanan negara, dan tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pasal 3

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat, serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pasal 4

- (1) Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :
 - a. alat-alat kepolisian khusus;
 - b. penyidik pegawai negeri sipil;

- c. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- (2) Pengemban fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Pasal 5

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah unsur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang terutama berperan memelihara keamanan dalam negeri.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan fungsi kepolisian.

BAB II

SUSUNAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Pasal 6

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan fungsi kepolisian, wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Daerah hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 7

Susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia disesuaikan dengan kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenangnya yang diatur lebih lanjut oleh Panglima atas usul Kepala Kepolisian Republik Indonesia.



Pasal 8

- (1) Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Dalam penyelenggaraan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden dibantu oleh Menteri dan Panglima.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 9

- (1) Kepala Kepolisian Republik Indonesia memimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia dan menyelenggarakan pimpinan teknis Kepolisian, menetapkan kebijakan, serta pengendaliannya.
- (2) Kepala Kepolisian Republik Indonesia memimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas :
 - a. penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. penyelenggaraan pembinaan kemampuan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- (3) Kepala Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada :
 - a. ayat (2) huruf a bertanggung jawab kepada Menteri;
 - b. ayat (2) huruf b bertanggung jawab kepada Panglima;
- (4) Tata cara pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diatur lebih lanjut oleh Menteri dan ayat (3) huruf b oleh Panglima.

Pasal 10

- (1) Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah

hukum sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 6 ayat (2)**, bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian secara hierarki.

- (2) Tanggung jawab secara hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 11

- (1) Kepala Kepolisian Republik Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Yang dapat diangkat menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia adalah Perwira Tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan selain yang dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Panglima, atas usul Kepala Kepolisian Republik Indonesia

Pasal 12

- (1) Jabatan penyidik dan penyidik pembantu adalah jabatan fungsional, dan pejabatnya diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
- (2) Jabatan tertentu lainnya di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia ditentukan dan diusulkan sebagai jabatan fungsional oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 13

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. selaku alat negara penegak hukum memelihara serta meningkatkan tertib hukum;
- b. melaksanakan tugas kepolisian selaku pengayom dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bersama-sama dengan segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan negara lainnya membina ketentraman masyarakat dalam wilayah negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- d. membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya usaha dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c;
- e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia :
 - a. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - b. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, dan laboratorium forensik serta psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
 - c. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
 - d. memelihara keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 - e. menyelenggarakan segala kegiatan dalam rangka membina

keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;

- f. melindungi dan melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara, sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
 - g. membina ketaatan diri warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
 - h. turut serta dalam pembinaan hukum nasional dan pembinaan kesadaran hukum masyarakat;
 - i. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap alat-alat kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa yang memiliki kewenangan kepolisian terbatas;
 - j. melakukan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - k. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional.
- (2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 :

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :
 - a. menerima laporan dan pengaduan;
 - b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
 - c. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
 - d. mencari keterangan dan barang bukti;

- e. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- f. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- g. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- h. mengawasi aliran kepercayaan yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- i. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- j. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- k. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu;
- l. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- m. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian yang mengikat warga masyarakat.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :
- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- c. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- d. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- e. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;

- f. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis Kepolisian;
 - g. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
 - h. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.
- (3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 16

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;

- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak untuk melaksanakan cegah dan tangkal terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pasal 17

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya diseluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum masing-masing tempat ia diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.

BAB IV PEMBINAAN PROFESI

Pasal 20

Pembinaan kemampuan profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Panglima.

Pasal 21

Pembinaan profesi pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia di selenggarakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalamannya di bidang teknis kepolisian melalui pendidikan dan pelatihan serta penugasan secara berjenjang dan berlanjut.

Pasal 22

Guna menunjang pembinaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 dilakukan pengkajian, penelitian, serta pengembangan ilmu dan teknologi kepolisian.

Pasal 23

- (1) Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada kode etik profesi kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia juga menjadi pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungannya.
- (3) Kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 24

- (1) Pelanggaran terhadap kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 25

- (1) Setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pengemban fungsi kepolisian lainnya wajib menunjukkan tanda pengenal sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam mengemban fungsinya.
- (2) Bentuk, ukuran, pengeluaran, pemakaian, dan penggunaan tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

BAB V

HUBUNGAN DAN KERJA SAMA

Pasal 26

- (1) Hubungan dan kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan badan, lembaga, serta instansi di dalam dan di luar negeri didasarkan atas sendi-sendi hubungan fungsional, saling menghormati, saling membantu, mengutamakan kepentingan umum, serta memperhatikan hierarki.
- (2) Hubungan dan kerja sama di dalam negeri dilakukan terutama dengan unsur-unsur pemerintah daerah, badan, lembaga, instansi lainnya, serta masyarakat dengan mengembangkan asas partisipasi dan subsidiaritas.

16

- (3) Hubungan dan kerja sama luar negeri dilakukan terutama dengan badan-badan kepolisian dan penegak hukum lainnya melalui kerja sama bilateral atau multilateral dan badan pencegahan kejahatan baik dalam rangka tugas operasional maupun kerja sama teknik dan pendidikan serta pelatihan.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) Dalam keadaan sangat mendesak dan terpaksa untuk kepentingan umum, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat meminta bantuan dan menggunakan unsur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia lainnya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 28

Dalam keadaan bahaya, Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan tugas bersama-sama dengan segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Dengan berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan pelaksanaan mengenai Kepolisian Negara Indonesia dinyatakan

ADN - Perpustakaan Universitas Airlangga
tetap berlaku selama ketentuan baru berdasarkan Undang-undang ini belum dikeluarkan dan sepanjang peraturan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2289) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Kepolisian" dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 1997

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

S O E H A R T O

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 1997

MENTERI NEGARA SEKRETARIS
NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ttd.

M O E R D I O N O

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1997 NOMOR 81

**Daftar Singkatan Yang Berkaitan
Dengan Kegiatan Werving Personel Polisi**

1. TR. TTG RIMPELERS = Telegram Tentang Penerimaan Personel
2. RPK MIN = Rekapitulasi Penelitian Kelengkapan Administrasi
3. TEST PARADE = Test yang dilakukan untuk melihat penampilan fisik dari calon personel Polri. Diantaranya dengan melihat cara berjalan, cara berbicara, perbandingan bagian tubuh, bentuk kaki, mata dan lain – lain. Pada saat test ini biasanya calon peserta hanya menggunakan pakaian dalam saja.
4. TEST RIKKES = Test Pemeriksaan Kesehatan.
5. PANTUKHIRPUS = Panitia Penentu Akhir Pusat.
5. RENLAKGIAT = Rencana Pelaksanaan Kegiatan
7. Test Kesamaptaan Jasmani = Test Kesiap Siagaan Jasmani. Test ini terdiri dari beberapa item yaitu:
 - a. Test Lari selama 12 menit (Kesamaptaan A)
 - b. Test Kesamaptaan B terdiri dari :
 - 1) Push Up selama 1 menit
 - 2) Pull Up selama 1 menit
 - 3) Sit up selama 1 menit
 - 4) Shuttle Run (Lari membuat angka 8 sebanyak 3 kali putaran sejauh 10 meter)

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
Jl. A Yani No. 116 Surabaya

PENGUMUMAN
NO.POL : PERG / 15 / 2000

1 1 1 1 1

PENERIMAAN CALON BINTARA
POLRI PRIA/WANITA T.A 2000/2001

Dasar telegram Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : TR / 15 / 2000 tanggal, 21 - 01 - 2000 tentang pemberitahuan pelaksanaan dan persyaratan penerimaan BA Polri Pria/Wanita Tahun 2000/2001.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini diumumkan bahwa KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR (Polda Jatim) memberikan kesempatan kepada para Pemuda / Pemuda dalam wilayah Jawa Timur untuk dididik menjadi BINTARA POLRI PRIA/WANITA T.A 2000/2001.

Persyaratan umum yang harus dipenuhi :

- a. Warga Nagara Indonesia
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- c. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945
- d. Berumur minimal 18 tahun, maksimal 22 tahun, terhitung mulai tanggal 21 Juli 2000
- e. Berijazah SLTA sederajat tidak termasuk (SPK, SMK BUSANA/BOGA /KECANTIKAN/PERAGA/TEKNIK BUKU TK).
- f. Bagi peserta yang masih kelas III dan sedang EBTANAS dapat menunjukkan Surat Keterangan dari Kepala Sekolah.
- g. Khusus Anggota KAMRA Pamsung Pemilu yang masih aktif (dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kasatwil tempat bertugas) berusia Maksimal 24 tahun bagi yang berijazah SLTA dan Maksimal 28 tahun bagi yang berijazah S - I dan D - III (bmt 31 Juli 2000).
- h. Berkelakuan baik yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB) dari Polres setempat.
- i. Sehat Jasmani dan rokhani serta tidak berkaca mata
- j. Tidak kehilangan hak untuk menjadi anggota Polri
- k. Persyaratan lain meliputi :
 - 1) Tinggi badan minimal :
 - (1) 163 Cm bagi Calon Ba Polri Pria.
 - (2) 160 Cm bagi Calon Ba Polri Wanita
 - (3) 160 Cm bagi Pria yang memiliki Danem rata-rata min 7 (Tujuh)
 - (4) 158 Cm bagi Wan yang memiliki rata-rata Danem min. 7 (Tujuh)
 - 2) Belum pernah kawin dan sanggup tidak kawin selama dalam pendidikan ditambah 2 (dua) tahun setelah lulus dan diwajibkan Pangkat Serda.
 - 3) Bersedia menjalankan Ikatan Dinas sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun
 - 4) Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia
 - 5) Memperoleh persetujuan orang tua/wal.
 - 6) Mengikuti dan lulus seleksi / ujian yang meliputi :
 - (1) Perlengkapan persyaratan Administrasi
 - (2) Parade / Postur
 - (3) Peragaan Keselamatan badan
 - (4) Test Kesamaptaan Jasmani

- (5) Ujian Metafisis
(6) Psikologi
(7) Ujian Tertulis meliputi :
7.1. Pengetahuan umum
7.2. Bahasa Inggris
7.3. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN)

Persyaratan tambahan merupakan Talent Scouting bagi calon BA Polri Pria / Wanita yang memiliki :

1. Prestasi Paskibraka Tingkat Nasional
2. Prestasi dibidang Olah Raga tingkat Nasional (termasuk Bela Diri)
3. Nilai Ebtanas murni lebih dari tujuh (7)
4. Kualifikasi mahir dasar satu Pramuka
5. Ketrampilan Oprator / Programmer / Analisis Komputer
6. Ketrampilan mengemudi Ranmor (Sim A, B, C).

Tersebut huruf K angka 1 s/d 6 diatas agar melampirkan foto Copi sertipikat / piagam / piagam penghargaan / surat keterangan/ ijasah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

Tempat Pendaftaran dan ketentuan untuk mendaftar :

a. Tempat Pendaftaran :

- 1) Mapolda Jatim (sebagai Panda) Jl. Jend A Yani Wonocolo No.116 Surabaya
- 2) Mapolwil Malang (sebagai Sub Panda) Jl. Raya Singosari Malang
- 3) Mapolwil Madiun (sebagai Sub Panda) Jl. Kombes Pol Sunarya No. 17 Madiun

b. Peserta / Pendaftar harus datang sendiri ke tempat pendaftaran dengan membawa :

- 1) Ijasah asli / STTB (SD, SMP, SMU/ Sederajat)
- 2) Asli Akte / Kenal lahir dari Bupati / Wali Kota
- 3) Asli SKKB dari Polres dan KTP Asli
- 4) Pas Photo hitam putih ukuran 4 x 6 Cm sebanyak 7 lembar
- 5) Stop Map Warna kuning 3 lembar
- 6) Bagi yang masih kelas 3 (tiga) SLTA, sebagai pengganti Ijasah SMU / sederajat adalah surat keterangan dari Kepala Sekolah bahwa masih kelas (tiga) dan diijinkan mengikuti Ujian Calon BA Polri
- 7) Memenuhi syarat tinggi badan diukur oleh Panitia.
- 8) Khusus Anggota Kamra selain tersebut diatas membawa KTA asli dan surat keterangan dari Kasatker

Waktu Pendaftaran :

Pendaftaran dibuka pada tanggal, 01 Pebruari 2000 dan ditutup pada tanggal, 29 Pebruari 2000 pukul 14.00 Wib. pada tiap - tiap tempat pendaftaran.

Hal lain yang berhubungan dengan jadwal kegiatan ujian dan kelengkapan Administrasi akan diumumkan kepada para peserta saat pembagian blangko persyaratan Administrasi.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Dikeluarkan di : Surabaya
Pada tanggal : 24 Januari 2000

An. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR

KADIT PERS

MUCHLIS HAJAZATI SniK, SH

KOL ... F ... 0144

P E M U D A
NO. POLRI / WING / 130 / 2000

Tanjung

**PENERIMAAN CALON TAMTAMA
POLRI TAHUN 2000**

Dasar Telegram Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : T / 130 / 2000 tanggal, 24 April 2000 tentang pemberitahuan pelaksanaan dan persyaratan penerimaan TA Polri tahun 2000

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini diumumkan bahwa KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR (Polda Jatim) memberikan kesempatan kepada para Pemuda dalam wilayah Jawa Timur untuk dididik menjadi TAMTAMA POLRI tahun 2000.

Persyaratan umum yang harus dipenuhi :

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- c. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945
- d. Berumur minimal 18 tahun, maksimal 22 tahun., terhitung mulai tanggal 31 juli 2000
- e. Berhasil serendah rendahnya SLTP/ sederajat,utamakan bagi Casis yang berhasil SLTA/ sederajat dengan tinggi badan minimal 163 Cm.
- f. Bagi peserta yang masih kelas III SLTA dan sedang EBANAS dapat menunjukkan Surat Keterangan dari Kepala Sekolah.
- g. Berkelakuan baik yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB) dari Polres setempat.
- h. Sehat Jasmani dan rohani serta tidak berkaca mata
- i. Tidak kehilangan hak untuk menjadi anggota Polri
- j. Persyaratan lain meliputi :
 - 1) Tinggi badan minimal 160 Cm dengan berat badan seimbang
 - 2) Belum pernah kawin dan sanggup tidak kawin selama dalam pendidikan ditambah 2 (dua) tahun setelah lulus dan diangkat Bharada
 - 3) Bersedia menjalankan ikatan Dinas sekurang - kurangnya 7 (tujuh) tahun
 - 4) Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia
 - 5) Memperoleh persetujuan orang tua / wali.
 - 6) Mengikuti dan lulus seleksi / ujian yang meliputi :
 - (1) Penuhengkapan persyaratan Administrasi
 - (2) Parade / Pergaulan
 - (3) Pemeriksaan Kesehatan badan
 - (4) Test Kesamaptaaan Jasmani
 - (5) Ujian Metal Idiologi
 - (6) Psikologi
 - (7) Ujian Tertulis meliputi :
 - 7.1. PPKN
 - 7.2. Bahasa Indonesia
 - 7.3. Pengetahuan Umum

/ Persyaratan

Persyaratan tambahan merupakan Talent Scouting bagi calon TA Polri Pria yang memiliki :

1. Prestasi Paskibraka Tingkat Nasional
2. Prestasi dibidang Olah Raga tingkat Nasional (termasuk Bela Diri)
3. Nilai Ebtanas inumri lebih dari tujuh (7)
4. Kualifikasi mahir dasar satu Pramuka
5. Ketrampilan Oprator / Programmer / Analisis Komputer
6. Ketrampilan mengemudi Ranmor (Sim A, B, C)

Tersebut huruf K angka 1 s/d 6 diatas agar melampirkan foto Copi, sertipikat / piagam / piagam penghargaan / surat keterangan/ ijazah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

Tempat Pendaftaran dan ketentuan untuk mendaftar :

a. Tempat Pendaftaran :

- 1) Mapolda Jatim (sebagai Panda) Jl. Jend A Yani Wonocolo No. 116 Surabaya

b. Peserta / Pendaftar harus datang sendiri ke tempat pendaftaran dengan membawa :

- 1) Ijazah asli / STTB (SD, SMP, SMU/ Sederajat)
- 2) Asli Akte / Kenal lahir dari Bupati / Wali Kota
- 3) Asli SKKB dari Polres dan KTP Asli
- 4) Pas Photo hitam putih ukuran 4 x 6 Cm sebanyak 7 lembar
- 5) Stop Map Warna kuning 3 lembar
- 6) Bagi yang masih kelas 3 (tiga) SLTA, sebagai pengganti Ijazah SMU / sederajat adalah surat keterangan dari Kepala Sekolah bahwa masih kelas (tiga) dan diijinkan mengikuti Ujian Calon TA Polri
- 7) Memenuhi syarat tinggi badan diukur oleh Panitia.

Waktu Pendaftaran :

Pendaftaran dibuka pada tanggal, 01 s/d 17 -05 - 2000 mulai pukul 07.30 wib s/d 14.00 Wib.

Hal lain yang berhubungan dengan jadwal kegiatan ujian dan kelengkapan Administrasi akan diumumkan kepada para peserta saat pembagian blangko persyaratan Administrasi.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Dikeluarkan di : Surabaya
Pada tanggal : 28 April 2000

An. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR
KADIT PERS

MUCHLIS HAMZAH SmIK, SH

KOLONEL POLISI NRP. 47020144

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR

PENDIDIKAN KEJURUAN (DIKJUR)
BIDANG OPSNAL DAN PEMBINAAN
ANGGOTA POLRI

ADAPUN PERSYARATANNYA ADALAH :

A. UNTUK PERWIRA PERTAMA (PAMA) ADLH :

1. ANGGOTA POLRI BERPANGKAT PAMA.
2. DIKMIL SEPA POLRI/AKPOL DAN SETUKPA.
3. UMUR MAX 40 TH.
4. BERTUGAS PD SELURUH FUNGSI KEPOLISIAN.
5. SEHAT JASMANI DAN ROHANI DINYATAKAN DOKTER POLRI.
6. KONDUITE BAIK DIKETAHUI OLEH PIMPINAN YG BERWENANG.
7. REKOMENDASI PIMPINAN.
8. KHUSUS POLWAN TDK DLM KEADAAN HAMIL.
9. BLM MEMILIKI DIKJUR YG SAMA.

B. UNTUK BINTARA / TAMAMA ADLH :

1. ANGGOTA POLRI BERPANGKAT BA DAN TA.
2. UMUR MAX 40 TH.
3. BERTUGAS PD SELURUH FUNGSI KEPOLISIAN.
4. SEHAT JASMANI DAN ROHANI DINYATAKAN DOKTER POLRI.
5. KONDUITE BAIK DIKETAHUI OLEH PIMPINAN YG BERWENANG.
6. REKOMENDASI PIMPINAN.
7. KHUSUS POLWAN TDK DLM KEADAAN HAMIL.
8. BLM MEMILIKI DIKJUR YG SAMA.

REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR



SURAT - TELEGRAM

D A R I : KAPOLDA JATIM DERAJAT : KILAT
 K E P A D A : 1. PARA KADIT POLDA JATIM KLASIFIKASI : BIASA
 2. KAPOLWIL TABES SBY
 3. KAPOLWIL SEJATIM
 4. KA KORSPRIPIM POLDA JATIM
 T E M B U S A N : 1. DESUMDAMAN KAPOLRI
 2. KAPOLDA JATIM
 3. DIR DALPERS POLRI

N O P O L : ST 647 / XI / 2001 / DITPERS TGL 9 - 11 - 2001

AAA TTK REF SRT TELEGRAM KAPOLRI NOPOL ST/89B/XI/2001 TGL 6-11-2001 KHA TIG PELAKSANAAN DIK KSA X DAN KRA XXXV LEMHANNAS TA 2002 TTK

HRH TTK DIINFORMASIKAN KEPD TSB ALAMAT BHW AKAN DISELENGGARAKAN DIK KSA X LEMHANNAS TA 2002 DR TGL 20 JULI S/D 25 NOPEMBER 2002 DAN KRA XXXV LEMHANNAS TA 2002 DR TGL 6 APRIL S/D 24 DESEMBER 2002 TTK

CCC TTK ADAPUN PERSYARATAN CLN PESERTA KSA X DAN KRA XXXV LEMHANNAS TA 2002 ADLH SBB TTKDUA

SATU TTK CLN PESERTA KSA X LEMHANNAS TA 2002 ADLH SBB TTKDUA

AA TTK BERSIH DR MASALAH SECURITY TTK

BB TTK MENDUDUKI JABATAN PATI TTK

CC TTK PANGKAT MINIMAL BINTANG SATU MIN DUA TAHUN DGN USIA MINIMAL 50 TH DAN MAK SIMAL DUA TAHUN SEBELUM MENCAPAI USIA PENSUN TTK

DD TTK BAGI YG BERPANGKAT BINTANG DUA ATAU LEBIH BISA KURANG DR USIA 50 TH TTK

EE TTK LULUSAN SESKO ANGKATAN/SESPIM POLRI DIUTAMAKAN YG TELAH MENGIKUTI SESKO TNI (SESKO ABRI) ATAU SESPATI POLRI TTK

/ FF TTK

SURAT TELEGRAM KAPOLDA JATIM
NO. POL : BI/648/XXI/2001/DITPERS
TANGGAL : 9 NOPEMBER 2001

FF TTK LULUS SELEKSI KESEHATAN OLEH PANITIA
 PEMERIKSAAN BADAN TENTARA NASIONAL
 INDONESIA ATAU POLRI (PPB TNI/POLRI)
 TTK
 GG TTK DIARAHKAN UTK MENDUDUKI JABATAN PD
 TINGKAT STRATEGI DAN MAMPU MENGEM-
 BANGKAN KEMAMPUAN DAN PENGALAMAN YG
 YG BERLINGKUP NASIONAL TTK
 HH TTK DIUSULKAN OLEH PIMPINAN POLRI TTK


DUA TTK CLN PESERTA KRA XXXV LEHANNAS TA 2002 ADLH
 SBB TTKDUA

AA TTK BERSIH DR MASALAH SECURITY TTK
 BB TTK MENDUDUKI JABATAN PATI ATAU MIN SE
 TINGKAT PERWIRA PEMBANTU UTAMA DI
 LINGKUNGAN TNI ATAU POLRI TTK
 CC TTK PANGKAT KOMBES POL MIN DUA TAHUN
 ATAU PATI BINTANG SATU TTK
 DD TTK USIA MAKSIMAL 30 TH TTK
 EE TTK LULUSAN SESKO ANGKATAN/SESPIN POLRI
 TTK
 FF TTK DIUTAMAKAN YG TELAH MENGIKUTI SESKO
 TNI (SESKO ABRI) ATAU SESPATI POLRI
 TTK
 GG TTK LULUS SELEKSI KESEHATAN OLEH PANITIA
 PEMERIKSAAN BADAN TENTARA NASIONAL
 INDONESIA ATAU POLRI (PPB TNI/POLRI)
 TTK
 HH TTK DIARAHKAN UTK MENDUDUKI JABATAN PD
 TINGKAT STRATEGI DAN MAMPU MENGEM-
 BANGKAN PENGETAHUAN DAN PENGALAMAN
 YG BERLINGKUP NASIONAL TTK
 II TTK DIUSULKAN OLEH PIMPINAN POLRI TTK

DDD TTK NAMA CLN PESERTA YG MEMENUHI PERSYARATAN PD POINT CCC TSB
 DIATAS SELAMBAT-LAMBATNYA PD TGL 16 NOPEMBER 2001 HRS SDH
 DITERIMA OLEH KADIT PERS POLDA JATIM CG KABAG DALKAR DGN
 FORMAT SBB TTKDUA

SATU TTK NOMOR TTK
 DUA TTK NAMA/NRP TTK
 TIGA TTK TEMPAT DAN TGL LAHIR TTK
 EMPT TTK AGAMA TTK
 LIMA TTK PANGKAT/TMT TTK
 ENAM TTK JABATAN/TMT TTK
 TUJH TTK DIKMA KMA DIKBANG DAN TAHUN KELULUSANNYA TTK
 DLPN TTK KETERANGAN TTK

EEE TTK DUMM TTK HBS

AN KAPOLDA JATIM
 NS KADIT PERS

 Drs. KURSAN
 AKBP NRP 53040049

SURAT - TELEGRAM

D A R I : KAPOLDA JATIM DERAJAT : KILAT
K E P A D A : 1. IRPOLDA JATIM KLASIFIKASI : BIASA
2. KAPUSKODALOPS POLDA JATIM
3. ASRENA KAPOLDA JATIM
4. PARA KADIT POLDA JATIM
5. KAPOLWIL TABES SBY
6. KAPOLWIL SEJATIM
7. KADIS DOKES KMA KADIS KUM KMA KA KU
DAN KAPUSKOP POLDA JATIM
8. KA LABFOR CAB SBY
9. DANSAT BRIMOBDA JATIM
10. PARA KADIS DAN KADEN POLDA JATIM
TEMBUSAN : 1. DESUMDAMAN KAPOLRI
2. KAPOLDA JATIM
3. DIR DALPERS POLRI
4. KASUBDIT LEKDIK DITDALPERS POLRI

N O P O L : ST/ /X/2001/DITPERS TGL - 10 - 2001

AAA TTK REF SRI TELEGRAM KAPOLRI NOPOL ST/866/X/2001 TGL 22-10-2001 KMA TTB PELAKSANAAN SELEKSI DIKLAT KEPEMIMPINAN TK II (SPAMEN) LAN TA 2002 TTK

BBB TTK DIINFORMASIKAN KPD TSB ALAMAT BHW PELAKSANAAN SELEKSI DIKLAT KEPEMIMPINAN TK II (SPAMEN) LAN TA 2002 AKAN DILAKSANAKAN DISETIAP PROPINSI SECARA BERTAHAP KMA ADAPUN PERSYARATAN UTK MENGIKUTI SELEKSI SPAMEN DIMAKSUD ADLH TTKDUA

SATU TTK PEJABAT ESELON III POTENSIAL DAN DIKENCANAKAN UTK MENJADI JABATAN ESELON II DLM WAKTU 2 (DUA) TH KMA SESUAI DGN FORMASI YG TERSEDIA TTK

DUA TTK PANGKAT MINIMAL BAGI PNS ADL PEMBINA (IV/A) DITETAPKAN YG DLM MENJADI PANGKAT TSB MINIMAL 3 (TIGA) TH KMA BAGI ANGGOTA POLRI MINIMAL BERPANGKAT AKRP TTK

/ TIGA TTK

2 SURAT TELEGRAM KAPOLDA JATIM
 NO. POL. : ST/ /X/2001/DITPERS
 TANGGAL : OKTOBER 2001

- TIGA TTK BAGI PEJABAT ESELON III USIA MAKSIMAL 48 TH DAN BAGI PEJABAT ESELON II (YG DIANGKAT SETE LAH DITETAPKANNYA PP 14 DAN 15 TH 1995) USIA MAKSIMAL 53 TH TTK
- EMPT TTK SEHAT FISIK DAN JASMANI YG DINYATAKAN OLEH NASU GENERAL MEDICAL CHECK UP TERAKHIR (PD SAAT SELEKSI) TTK
- LIMA TTK LULUS SELEKSI BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJABAT) SATKER / INSTANSI PEMBIRIM TTK
- ENAM TTK DICALONKAN DAN DITUGASKAN OLEH MENTERI/SEKRE TARIS JENDERAL / PEJABAT ESELON I FUNSIONAL PEMBINA SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) TTK
- TUJH TTK LULUS DIKLAT SEPADYA/SPAMA BAGI PNS DAN PTIK/ SELAPA BAGI ANGGOTA PUORI TTK
- CCC TTK SEHUB DGN HAL TSB DIATAS KMA BERSAMA INI MHN TSB ALAMAT LTK MENGIRIMKAN NAMA DAN PESERTA DR ANGGOTA PUORI MANIPUN PNS ORANGI PUORI MANIPUN PNS YG MEMENHI SYARAT PD BILUR HBB DUYAS SELAMAT-LAMBATNYA PD TGL 31 OKTOBER 2001 IRS SDI DITERIMA ULEH KADIT PERS MUDA JALIM CG KABAG DALIGR ATAU MELALUI TELP 031-8290084 PSWT 207 DGN MENYANTUNKAN DATA SBB BERIKUT
- SATU TTK NAMA TTK
- DUA TTK PANGKAT/NOJONGAN TTK
- TIGA TTK NRP/NIP TTK
- EMPT TTK TH PANGKAT/NOJONGAN TERAKHIR TTK
- LIMA TTK TH LALUR TTK
- ENAM TTK TAHUN KELULUSAN PTIK/SELAPA BAGI PUORI DAN SEPADYA/SPAMA BAGI PNS TTK
- DDD TTK DUMM TTK IRS

AN KAPOLDA JATIM
 WS KADIT PERS

Drs. KURNAN
 AKRP NRP 5.5040049

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR

SURAT - TELEGRAM

D A R I : KAPOLDA JATIM DERAJAT : KILAT
 K E P A D A : 1. IRPOLDA JATIM KLASIFIKASI : BIASA
 2. KA PUSKODALOPS POLDA JATIM
 3. ASRENA KAPOLDA JATIM
 4. PARA KADIT POLDA JATIM
 5. KAPOLWIL TABES SBY
 6. KAPOLWIL SEJATIM
 7. KADIS DOKKES KMA KADIS KUM KMA KA KU DAN
 KAPUSKOP POLDA JATIM
 8. KA LABFOR CAB SBY
 9. DARSAT BRIMOBDA JATIM
 10. KA PUSDIK BRIMOB DAN KA PUSDIK SABHARA
 LEMDIKLAT POLRI
 11. KAPOLRESTA DAN KAPOLRES SEJATIM
 12. KASAT POLAIRUD POLDA JATIM
 13. PARA KADEN DAN KADIS POLDA JATIM
 14. KA SPN MOJOKERTO KMA KASETUM DAN KA KOORD SPRIPIM
 POLDA JATIM
 TEMBUSAN : 1. WAKA POLRI
 2. ASPERS KAPOLRI
 3. KAPOLDA JATIM
 4. KA LEMDIKLAT POLRI
 5. DIR MINPERS POLRI
 6. KASUBDIT LEKDIK DITMINPERS POLRI

N O P O L : ST/ /III/2001/DITPERS TGL - 3 - 2001

AAA TTK REF SRT TELEGRAM KAPOLRI NOPOL ST/179/III/2001 TGL 16-3-2001 KMA TIG PEMBUKAAN DIK SESIMPOL DIKREG XXXVII TH 2001 TTK

BBB TTK DGN INI DIBRTHKAN BHW PD BLN JULI 2001 AKAN DIBUKA DIK SES PIM POLRI DIKREG XXXVII TH 2001 KMA ADAPIN PERSYARATANNYA ADH NDA TIKDIA

SATH TTK PA POLRI BERHANSKAT AKBP DAN KONTEL TTK

DUA TTK USIA MAKSIMAL 42 TH (EMPT PULUH DUA) TH ATAU NRP 59 TTK

/ TIGA TTK

2 SURAT TELEGRAM KAPOLDA JATIM
 NO.POL. : ST/ /III/2001/DITPERS
 TANGGAL : MARET 2001

- TIGA TTK MASA DINAS PERWIRA (MDP) MIN 13 (TIGA BELAS) TAHUN SAAT PENDAFTARAN TTK
- EMPT TTK LULUSAN DIK PTIK ATAU SELAPA MINIMAL 2 (DUA) TAHUN TTK
- LIMA TTK DISETUJUI DAN DIUSULKAN OLEH KA SATKERNYA TTK
- ENAM TTK MEMILIKI SURAT KETERANGAN HASIL PENELITIAN KHUSUS (SKIP) YG DIMINTAKAN OLEH DIR MINPERS POLRI TTK
- TUJUH TTK KHUSUS ANGGOTA POLRI YG BERPANGKAT KOMPOL DI PERSYARATKAN MEMILIKI MASA DINAS DLM PANGKAT (MDP) MIN 2 (DUA) TAHUN TTK
- DLPN TTK BAGI PAMEN POLRI LULUSAN S-2 KIK PROGRAM BIAYA DINAS POLRI KMA DIBERIKAN DISPENSASI HANYA MENGIKUTI SELEKSI TAHAP III TTK PUSAT TTK
- SBLN TTK BAGI PESERTA YG TELAH 3 KALI MENGIKUTI SELEKSI DIK SESPIM POLRI SAMPAI UJIAN TERBUKAS/PSIKOTESIS KMA TDK DIPERBOLEHKAN LAGI MENGIKUTI SELEKSI TTK
- SPLH TTK LULUS SELEKSI YG MELIPUTI TTKDUA

- AA TTK PEMERIKSAAN ADMINISTRASI TTK
- BB TTK TEST KESEHATAN BADAN TTK
- CC TTK LULUS TEST KESEHATAAN JASMANI TTK
- DD TTK PSIKOTESIS TTK
- EE TTK LULUS UJIAN TERBUKAS TTK DUA
- A TTK KANDAGRI TTK
- B TTK PROFESI KEPOLISIAN TTK
- C TTK BAHASA INGGRIS MINIMAL TOEFL 350 TTK
- D TTK KARANGAN ULNIAH TTK

FF TTK LULUS PANTHUKIR TTK

CCC TTK KELENGKAPAN ADMINISTRASI YG PERLU DISIAPKAN ADLH TTKDUA

- SATU TTK REKOMENDASI KA/PIMPINAN TTK
- DUA TTK SERIK MENGIKUTI SELEKSI DIK SESPIMPOL TTK
- TIGA TTK DAFTAR MINIMAL 25 TTK
- EMPT TTK DAFTAR KUNYAT HIDUP TTK
- LIMA TTK FOTO COPY SKEP PENGANGKATAN PERTAMA MENJADI PA TTK

/ FNAM TTK

3 SURAT TELEGRAM KAPOLDA JATIM
NO.POL. : ST/ /III/2001/DITPERS
TANGGAL : MARET 2001

ENAM TTK FOTO COPY SKEP PANGKAT TERAKHIR TTK
 TJUH TTK FOTO COPY SKEP JABATAN TERAKHIR TTK
 DLPM TTK FOTO COPY IJAZAH DIK POLRI TTK
 SBLN TTK FOTO COPY IJAZAH DIKBANG/SPES/DIKJUR TTK
 SPLH TTK FOTO COPY BUKU NASKAH KES PERORANGAN TTK
 SBLN TTK SURAT PERNYATAAN TELAH MENGIKUTI SELEKSI DIK
 SENTIM YG KE TTK
 DBLS TTK PAS PHOTO BERWARNA DGN LATAR MERAH PAKAIN PDH
 TANPA TITUP KEPALA UKURAN 2 X 3 = 4 LBR KMA
 3 X 4 = 4 LBR DAN 4 X 5 = 4 LBR TTK
 TBLS TTK STOP MAP WARNA MERAH SEBANYAK 3 LBR DAN MAP
 SINEMBILER WARNA MERAH SEBANYAK 2 LBR TTK
 EBLN TTK KELENGKAPAN ADMINISTRASI NO SATU SD SEPULUH
 DIRIAT RANGKAP 3 (TIGA) TTK

DDD TTK UTK PROSES PENERBITAN SKHP BAGI CALON PESERTA KMA DIHARAP
 TSB ALAMAT MENISATUKAN PERMISIONAN KE DIT (P) POLDA JATIM
 UTK SELANGGUTNYA DI PROSES KE MABES POLRI TTK

EEE TTK PD SAAT CALON PESERTA MENDAFTAR AGAR MEMBAWA KELENGKAPAN
 ADMINISTRASI SEBAGAIMANA BUTIR DTD DIATAS TTK

FFF TTK SELEKSI TAHAP I TINGKAT DAERAH MENGGUNAKAN SISTEM GUGUR
 BELITUNG TTK

SATU TTK KEMELUHAN ADMINISTRASI TTK
 DUA TTK TEST KESERAHAN BADAN TTK
 TIGA TTK TEST KESAMAPTAAN JASMANI TTK

GGG TTK JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI TAHAP I DITENTUKAN SBB TTKDUA

SATU TTK TGL 21-3-2001 S/D 6-4-2001 KMA PENYUSUNAN
 DAN RIKMIN TTK
 DUA TTK TGL 9 S/D 10-4-2001 KMA RIKKES BADAN TTK
 TIGA TTK TGL 11 S/D 12-4-2001 KMA KESAMAPTAAN JASMANI
 TTK
 EMPT TTK TGL 16-4-2001 KMA LAP ANIMO KE MABES POLRI
 TTK

HHH TTK PARA PA SATKER MABES POLRI YG MEMENUHI PERSYARATAN DAN BER
 TUGAS DI DAERAH KMA MENDAPILARKAN DIRI PD PANITIA DAERAH
 SEEMPAT TTK

/ J.J.T TTK

4 SURAT TELEGRAM KAPOLDA JATIM
NO. POL. : ST/ /III/2001/DITPERS
TANGGAL : MARET 2001

JJJ TTK SESUAI DGN ST KAPOLRI NOPOL ST/18/2000 TGL 14 FEBRUARI
2000 DITERANGKAN BLD SEHWA TUBAK BIK DOK BERTINDAK SEJAKI
SEKINDUSSELEP BERTUGI MELAKUKAN UPAYA-UPAYA DLM BENTUK LAIN
YB DPT MENYINGKATKAN PROSES SELEST YB DILAKSANAKAN TDH
PANDA HAMPUN CAMPUS TTK

KKK TTK DUMP TTK NBS

AN KAPOLDA JATIM
WS KADIT PERS

PK SUPRI I NISKUEN SMK
AKRP NRP 48050166



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR

SURAT - TELEGRAM

D A R I : KAPOLDA JATIM DERAJAT : KILAT
 K E P A D A : 1. IRPOLDA JATIM KLASIFIKASI : BIASA
 2. KA PUSKODALOPS POLDA JATIM
 3. ASRENA KAPOLDA JATIM
 4. PARA KADIT POLDA JATIM
 5. KAPOLWIL TABES SBY
 6. KAPOLWIL SEJATIM
 7. KADIS DOKKES KMA KADIS KUM KMA KA KU DAN
 KAPUSKOP POLDA JATIM
 8. KA LABFOR CAB SBY
 9. DANSAT BRIMOBDA JATIM
 10. KA PUSDIK BRIMOB DAN KA PUSDIK SABHARA
 LEMDIKLAT POLRI
 11. KAPOLRESTA DAN KAPOLRES SEJATIM
 12. KASAT POLAIRUD POLDA JATIM
 13. PARA KADEN DAN KADIS POLDA JATIM
 14. KA SPN MOJOKERTO KMA KASETUM DAN KA KOORD SPRIPIM
 POLDA JATIM

TEMBUSAN : 1. DESUMDAMAN KAPOLRI
 2. KAPOLDA JATIM
 3. DIR DALPERS POLRI
 4. KASUBDIT LEKDIK DITDALPERS POLRI

N O P O L : ST/ /VI/2001/DITPERS TGL - 6 - 2001

AAA TTE REF SRT TELEGRAM KAPOLRI NOMP. ST/519/VI/2001 TGL 27-6-2001 KMA TDS PEMBERITAHUAN DAN PERSYARATAN MASUK DIK SELA PA POLRI ANGK XXIX TA 2001 TTK

BBB TTK SEHUB DGN HAL TSB KMA BERSAMA INI DIBERITAHUKAN BHW DIK SELAPA POLRI ANGK XXIX TA 2001 AKAN DIBUKA PD TGL 7 AGUS NIS 2001 SELAMA 9 HLN KMA ADAPUN PERSYARATANNYA ADLH SBB TTKDUA

SATU TTK PERWIRA POLRI BERPANGKAT SERENDAH-RENDANNYA AKP DGN MDDP MIN 1 TH INT 01-07-2000 TTK

/ DUA TTK

2 SURAT TELEGRAM KAPOLDA JATIM
NO.POL. : ST/ /VI/2001/DITPERS
TANGGAL : J U N I 2001

- DUA TTK USIA MAKSIMAL 45 TH NRP 56..... TTK
 TIGA TTK MEMPUNYAI KONDI TE BAIK YG DINYATAKAN DLM
 BAPEN MIN 23 (DLM PLH TIGA) OLEH KA/PIMPINAN
 YG BERWENANG TTK
 EMPAT TTK BERMENTAL BAIK DAN TDK TERLIBAT GERAKAN SUB
 VERSI/EKSTREM LAINNYA YG DINYATAKAN DGN SRT
 KEPERAWANAN HASIL PENELITIAN PERSONEL (SKHP)
 OLEH POLDA TTK
 LIMA TTK DIUTAMAKAN YG TLH MENGIKUTI DIKBANG SPESIALI
 SASI/KEJURUAN TTK
 ENAM TTK PARA PESERTA YG MEMENUHI PERSYARATAN KMA DI
 TUNJUK/DIUSULKAN DGN SRT PERINTAH TTK MENGI
 KUTI SELEKSI DIK SELAPA OLEH KA/PIMPINAN YG
 BERWENANG TTK
 TUJUH TTK LULUS SELEKSI YG MELIPUTI TTKDUA
 AA TTK PEMERIKSAAN ADMINISTRASI TTK
 AB TTK PEMERIKSAAN KESEHATAN BADAN TTK
 AC TTK TEST KESAMAPTAAN JASMANI TTK
 AD TTK PSIKUJEST TTK
 AE TTK UJIAN TERBUKIS MELIPUTI TTKDUA
 1 TTK PENGETAHUAN KEPOLISIAN TTK
 2 TTK PENGETAHUAN UMUM TTK
 3 TTK BAHASA INGBRIS TTK
 4 TTK KARANGAN BULIS (DGN PERMAI DAN
 SISIM PENULAIAN SAMA DGN KARA
 NGAN UMIAH) TTK
 FF TTK WAWANCARA YG DILAKSANAKAN OLEH PAN
 PUS (APABILA DIPERLUKAN) TTK
 DLPN TTK MERUPAKAN TALENT SCOUTING BAGI PESERTA YG ME
 MILIKI IJAZAH SARJANA S-2 TTK
 SBLN TTK BAGI ANGGOTA POLRI YG SDH 3 (TIGA) KALI GAGAL
 MENGIKUTI SELEKSI SAMPAI DGN TERBUKIS TDK DI
 PERKENANKAN LAGI MENGIKUTI SELEKSI TTK
 CCC TTK PANDA DIDLM MELAKSANAKAN UJIAN/SELEKSI MASUK CLN PASIS SE
 LAMA POLRI ANGG XXIX TA 2001 TK DAERAH AGAR MELAKSANAKAN
 SISIM BERGUR DI ANGG SISIM BERGUR KMA YG MELIPUTI TTKDUA
 SAH TTK PENELITIAN ADMINISTRASI TTK
 DIA TTK PEMERIKSAAN KESEHATAN BADAN TTK
 TIGA TTK TEST KESAMAPTAAN JASMANI TTK

/ DDD TTK

3 SURAT TELEGRAM KAPOLDA JATIM
NO. POL. : ST/ /VI/2001/DITPERS
TANGGAL : J U N I 2001

DDD TTK KELENGKAPAN ADMINISTRASI YANG PERLU DISIAPKAN SBB TTKDUA

SATU TTK FOTO COPY SKEP PENANGKATAN PERTAMA MENJADI PA (DIKTUK PA) TTK
 DUA TTK FOTO COPY SKEP PANGKAT TERAKHIR TTK
 TIGA TTK FOTO COPY IJAZAH DIK PA POLRI TTK
 EMP TTK DAFTAR RINAYAT HIDUP SINGKAT TTK
 LIMA TTK IJIN/REKOMENDASI DR KA/PIMPINAN YG BERMENANG TTK
 ENAM TTK SRT KET HASIL PENELITIAN PERSONEL (SKHP) TTK
 TUJH TTK DAFTAR PENILAIAN (DAPEN) TTK
 DLPN TTK PAS PHOTO BERNWARNA DGN PAKAIAN PDH TANPA TTP KEPALA DGN LATAR BELAKANG MERAH UK 3 X 4 DAN 2 X 3 MASING-MASING SEBANYAK 5 LBR TTK
 SBLN TTK SRT PERNYATAAN MENGIKUTI SELEKSI PD TH 2001 YG KE TTK
 SPLH TTK PERSYARATAN ADM TSB DIBUAT RANGKAP 3 BENDEL TTK
 SBLS TTK STOPMAP WARNA MERAH SEBANYAK 3 LBR DAN SNELC HEKTER WARNA MERAH 2 LBR TTK

EEE TTK JADWAL KEGIATAN SELEKSI TAHAP I ADLH TTKDUA

SATU TTK PENDAFTARAN DAN RUKMIN = TGL 2 S/D 9-7-2001 TTK
 DUA TTK RIKKES BADAN = TGL 10 S/D 11-7-2001 TTK
 TIGA TTK TEST KES JASMANI = TGL 12 S/D 13-7-2001 TTK
 EMP TTK LAP ANIMO KE MABES POLRI TGL 17-7-2001 TTK

FFF TTK UTK KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINISTRASI KHUSUSNYA SKHP KMA DIHARAPKAN TSB ALAMAT MENGHATIKAN PERMINTAAN KE DIT (PP POLDA JATIM DGN TEMBUSAN DITPERS POLDA JATIM TTK

GGG TTK BAGI PAMA YG MEMENUHI PERSYARATAN TSB BUTIR BBB DIATAS KMA AGAR MENGIKUTI SELEKSI SELAPA POLRI ANHK XXIX TA 2001 DAN DIHARAPKAN KASATKER/WIL MENDUKING KELANCARAN ADMINISTRASI KEBALU BAGI PAMA YG MASIH MEMILIKI TINGGAKAN PERKARA/PER MASALAHAN TTK

HHH TTK PD SAAT PENDAFTARAN KMA PARA CLN PESERTA SELEKSI AGAR MEM BAWA BEKAS PERSYARATAN ADMINISTRASI LENGKAP SESUAI BUTIR DDD DIATAS TTK

III TTK DUNM TTK HBS

AN KAPOLDA JATIM
 KADIT PERS

RIWAN AMIN
 KIRKES POL NKP 47/2007

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR

SURAT - TELEGRAM

D A R I : KAPOLDA JATIM DERAJAT : KILAT

K E P A D A : 1. IRPOLDA JATIM KLASIFIKASI : BIASA

2. KA PUSKODALOPS POLDA JATIM
3. ASRENA KAPOLDA JATIM
4. PARA KADIT POLDA JATIM
5. KAPOLWIL TABES SBY
6. KAPOLWIL SEJATIM
7. KADIS DOKKES KMA KADIS KUM KMA KA KU DAN KAPUSKOP POLDA JATIM
8. KA LABFOR CAB SBY
9. DANSAT BRIMOBDA JATIM
10. KA PUSDIK BRIMOB DAN KA PUSDIK SABHARA LEMDIKLAT POLRI
11. KAPOLRESTA DAN KAPOLRES SEJATIM
12. KASAT POLAIRUD POLDA JATIM
13. PARA KADEN DAN KADIS POLDA JATIM
14. KA SPN MOJOKERTO KMA KASETUM DAN KA KOORD SPRIPIM POLDA JATIM

TEMBUSAN : 1. WAKA POLRI
2. ASPERS KAPOLRI
3. KAPOLDA JATIM
4. KA LEMDIKLAT POLRI
5. DIR MINPERS POLRI
6. KASUBDIT LEKDIK DITMINPERS POLRI

N O P O L : ST/ /2001/DITPERS TGL - 2 - 2001

AAA TTK REF SRT TELEGRAM KAPOLRI NOPOL ST/115/II/2001 TGL 13-2-2001 KMA TTG PEMBUKAAN DIK PTIK ANSK XXXVIII TH 2001 TTK

BBB TTK SEHUB DGN HAL ISB KMA DAN INI DIARTHKAN BHW PD BULAN MEI 2001 AKAN DIRIKA DIK PTIK ANSK XXXVII TAHUN 2001 KMA ADA / PUN PERSYARATANNYA ADLH SBB TTKDUA

SATU TTK PA POLRI BERPANGKAT SERENDAH-RENDAHNYA IPTU MEMILIKI MASA DINAS DALAM PANGKAT (MDDP) 1 (SATU) TAHUN TTK
DUA TTK USIA MAKS 32 (TIGA PULUH DUA) TAHUN PD SAAT BUKA DIK (NRP 6905....) TTK
TIGA TTK MEMPUNYAI KONDUITE BAIK YG DINYATAKAN DALAM DAPEN MINIMAL 73 (TUJUH PULUH TIGA) OLEH KA/ PIMPINAN YG BERWENANG TTK

/ ENPT TTK

- EMPT TTK BERMENTAL BAIK DAN TDK TERLIBAT GERAKAN SUB
VERSI/EKSTREM LAINNYA YG DINYATAKAN DG SECURI
TY DI KARANGE OLEH TENING MILSAT / POLDA TTK
- LIMA TTK DIUTAMAKAN YG TLH MENGIKUTI DIKBANG SPES/KEJU
RUAN DIRIDANSI IPSNAL TTK
- ENAM TTK BAGI ANGGOTA POLRI YG TELAH 3 (TIGA) KALI
ATAU LEBIH MENGIKUTI SELEKSI PTIK KMA TIDAK
DIBERIKAN KESEMPATAN LAGI DTK MENGIKUTI SELEK
SI DIMAKSUD TTK
- TUJUH TTK PARA PESERTA YG MEMENUHI PERSYARATAN KMA DI
USULKAN/DITUNJUK DAN SURAT PERINTAH DTK MENGI
KUTI SELEKSI PENDIDIKAN PTIK YG DIBERIKAN
OLEH KA/PIMPINAN YG BERWENANG TTK
- DLPN TTK LULUS SELEKSI YG MELIPUTI TTKDUA
- AA TTK PENELITIAN ADMINISTRASI TTK
AB TTK PEMERIKSAAN KES BAHAN TTK
AC TTK TEST KESAMAPTAAN JASMANI TTK
AD TTK TEST PSIKOLOGI TTK
AE TTK LULUS UJIAN TERTULIS MELIPUTI TTKDUA
- 1 TTK PENGETAHUAN KEPOLISIAN TTK
2 TTK PENGETAHUAN UMUM TTK
3 TTK BAHASA INGBRIS (MIN 100FL
300) TTK
4 TTK KARANGAN ILMIAH TTK
- FF TTK TEST WAWANCARA YG DILAKSANAKAN OLEH
PANPIS TTK
- CCC TTK PELAKSANAAN SELEKSI DIK PTIK ANGK XXXVIII TAHUN 2001 MENG
BUNAKAN SISTEM GUGUR DI ANSI SISTEM GUGUR KMA YG MELIPUTI
TTKDUA
- SATU TTK PENELITIAN ADMINISTRASI TTK
DUA TTK PEMERIKSAAN KESEHATAN BADAN TTK
TIGA TTK TEST KESAMAPTAAN JASMANI TTK
- DDD TTK KELENGKAPAN ADMINISTRASI YG HRS DISIAPKAN ADLH SBB TTKDUA
- SATU TTK FOTO COPY SKEP PENGANGKATAN PERTAMA MENJADI
PA TTK
DUA TTK FOTO COPY IJAZAH DIK PA POLRI TTK
TIGA TTK FOTO COPY IJAZAH DIKBANG SPES/DIKJUR BID OPS
NAL TTK
EMPT TTK FOTO COPY SKEP PANGKAT TERAKHIR TTK
LIMA TTK FOTO COPY SKEP JABATAN TERAKHIR TTK
ENAM TTK DAFTAR RIWAYAT HIDUP SINGKAT TTK
TUJUH TTK IJIN/REKOMENDASI DR KA/PIMPINAN YG BERWENANG
TTK

/ DLPN TTK

- DLPN TTK SRT KET HASIL PENELITIAN PERSONEL (SKHP)/ SC
TTK
- SBLN TTK DAFTAR PENILAIAN (DAPEN) TTK
- SPLH TTK SURAT PERNYATAAN TELAH MENGIKUTI SELEKSI DIK
PTIK YG KE TTK
- SBSL TTK PAS PHOTO DGN PAKAIAN PDH TANPA TUTUP KEPALA
DGN LATAR BELAKANG WARNA MERAH UK 5 X 4 DAN
2 X 3 MASING-MASING 6 LBR TTK
- DBLS TTK SEMUA FC HRS DILEGALISIR OLEH KA/PIMP TTK
- TBSL TTK STOP MAP DAN SNELCHEKTER WARNA MERAH MASING-
MASING SEBANYAK 2 LBR TTK
- BUTIR SATU S/D BUTIR SPLH MASING-MASING RANGKAP 3 BENDEL
TTK
- EEE TTK JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI DITENTUKAN SBB TTKDUA
- SATU TTK TGL 15 S/D 28 FEBRUARI 2001 KMA PENDAFTARAN
TTK
- DUA TTK TGL 1 DAN 2 MARET 2001 KMA RIKKES BADAN TTK
- TIGA TTK TGL 6 DAN 7 MARET 2001 KMA JASMANI TTK
- EMPT TTK TGL 8 DAN 9 MARET 2001 KMA PROSES SKHP TTK
- LIMA TTK TGL 12 MARET 2001 KMA LAP ANING TTK
- FFF TTK JADWAL UJIAN TERTULIS AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN TTK
- GGG TTK UTK PROSES PENERBITAN SKHP BAGI CALON PESERTA KMA DIHARAP
KAN TSB ALAMAT MENGAJUKAN PERMOHONAN KE DIT UPP PULDA JIM
DGN TERBUKSIAN DUPER PULDA JATIM TTK KELENGKAPAN PERSYARA
TAN ADMINISTRASI TTK
- HHH TTK SPONSORSHIP SEDAPAT MUNGKIN DIHINDARI KMA NAMUN MENJADI CA
TATAN SEPANJANG CALON YG BERSANGKUTAN MEMENUHI PERSYARATAN
LULUS SELEKSI TTK
- JJJ TTK BAGI MEREKA YG DITERIMA KMA SELAMA MENGIKUTI DIK DIMUTASI
SAB PERSONEL PTIK DAN DIASRAMAKAN TANPA KEJUJURAN TTK
- KKK TTK MENGIINGAT TERBATASNYA WAKTU UTK SELEKSI TINGKAT DAERAH
MAKA PARA PAMA YG AKAN MENGIKUTI SELEKSI ANAR MEMBWA BER
KAS PERSYARATAN ADMINISTRASI LENGKAP SEMANA BUTIR DDD TSB
DIATAS DAN SESUAI JADWAL TTK
- LLL TTK DUMP TTK HBS (X)

AN KAPILDA JATIM
WS KADIT PERS

FX SUPRI I MURNIEN, SMIK
AKRP NRP 44030166

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR

SURAT - TELEGRAM

D A R I : KAPOLDA JATIM DERAJAT : KILAT
 K E P A D A : 1. IRPOLDA JATIM KLASIFIKASI : BIASA
 2. KA PUSKODALOPS POLDA JATIM
 3. ASRENA KAPOLDA JATIM
 4. PARA KADIT POLDA JATIM
 5. KAPOLWIL TABES SBY
 6. KAPOLWIL SEJATIM
 7. KADIS DOKKES KMA KADIS KUM KMA KA KU DAN
 KAPUSKOP POLDA JATIM
 8. KA LABFOR CAB SBY
 9. DANSAT BRIMOBDA JATIM
 10. KA PUSDIK BRIMOB DAN KA PUSDIK SABHARA
 LEMDIKLAT POLRI
 11. KAPOLRESTA DAN KAPOLRES SEJATIM
 12. KASAT POLAIRUD POLDA JATIM
 13. PARA KADEN DAN KADIS POLDA JATIM
 14. KA SPN MOJOKERTO KMA KASETUM DAN KA KOORD SPRIPIM
 POLDA JATIM
 15. KA KANWIL DEPDIKNAS TK I PROP JATIM
 TEMBUSAN : 1. ASPERS KAPOLRI
 2. KAPOLDA JATIM
 3. KA LEMDIKLAT POLRI
 4. DIR MINPERS POLRI
 5. KASABOTT LEMDIK DUMINPERS POLRI

N O P O L : ST/ /V/2001/DITPERS TGL - 5 - 2001

AAA TTK REF SRT TELEGRAM KAPOLRI NOPOL ST/389/V/2001 TGL 18-5-2001
 KMA TIG PERBUKHAAN PENDIDIKAN SETUKPA REG ANGGKATAN XXIX DAN
 SETUKPA SUS POLRI TH 2001 TTK

BBB TTK SEHUB DGN HAL TSB KMA DGN INI DIBRTHKAN BHW AKAN DIBUKA
 PENDIDIKAN SETUKPA REG ANGGKATAN XXIX DAN SETUKPA SUS POLRI,
 TH 2001 DGN PERSYARATAN SBB TTKDUA

SATU TTK DTK SETUKPA REG POLRI TTKDUA

AA TTK RINIARA POLRI DIKUM SARJANA/S-1 BER
 FANGKAT MIN BRIGADIR DAN MDDP SATU
 TH PD SAAT MASUK DIK (IMI 1-7-2000)
 TTK

BB TTK BINTARA POLRI DIKUM SARJANA MUDA/
 D-III MERPANGKAT MIN BRIGADIR DGN
 MDDP TIGA TH PD SAAT MASUK DIK (IMI
 1-4-1998) TTK

/ CC TTK

- CC TTK BINTARA POLRI DIKUM SLTA/SEDERAJAT
BERPANGKAT MIN BRIPKA DRN MDDP SATU
TH PD SAAT MAHUK DIK (TMT 1-7-2000)
TTK
- DD TTK LAMA PENDIDIKAN SEBELAS BLN TTK
- EE TTK USIA SETINGGI-TINGGINYA 42 TH (NRP
59...) TTK
- FF TTK BAGI ANGGOTA YG SDH TIGA KALI MENGI
KUTI LEK SAMPAI DGN UJIAN TERHILIS
KMA IDK DIPERKENANKAN MENGIKUTI LEK
TTK
- DUA TTK UTK SETUKPA SUS POLRI TTKDUA
- AA TTK BINTARA POLRI PRIA DIK UM MIN SLTA/
SEDERAJAT TTK
- BB TTK BERPANGKAT MIN AIPDA DGN TMT 1-1-
2001 TTK
- CC TTK LAMA PENDIDIKAN LIMA BLN TTK
- DD TTK USIA SETINGGI-TINGGINYA 48 TH (NRP
53...) TTK
- EE TTK PERNAH/SEDANG MENDUDUKI JAB PERWIRA
KMA KAPOLSEK KMA DANTON BRIMOB/DAL
MAS KMA KANIT KMA KAJUR BINUPS SAT
FUNG POLRES MIN ENAM BLN KMA YG DI
TUNJUKKAN/DIBUKTIKAN DGN SKEP KAPTIL
DA TTK
- TIGA TTK PERSYARATAN LAIN YG BERLAKU UTK SETUKPA REG
ANGKATAN XXIX DAN SETUKPA SUS POLRI TH 2001
ADLI TTKDUA
- AA TTK SAKTANA YG DIBUTUHKAN ADLI SEMUA
JURISAN TTK
- BB TTK BAGI PESERTA YG BERIJAZAH UMUM KPA
PD SAAT MENDPTKAN IJAZAH DIMAKSUD
SDH BERSTATUS SAG ANGGOTA POLRI DI
REMARKAN MENGIKUTI SELEKSI TTK
- CC TTK LEGALISASI IJAZAH DIKUM TTKDUA
- 1 TTK SARJANA/S-1 DAN SARJANA/D-III
ATAU SEDERAJAT DILEGALISIR
OLEH DEKAN FAKULTAS TERKAIT
DAN KEPERTIS SETEMPAT TTK
- 2 TTK SLTA / SEDERAJAT DILEGALISIR
OLEH KANWIL DEPDIKNAS TTK
- DD TTK BERPENDIDIKAN KEPOLISIAN DIKMA SEBA
PK ATAU DIKTIK SEBA REG TTK
- EE TTK BERMENTAL BAIK DAN TDK PERNAH TER
LIBAT TINDAK PIDANA ATAU HUKUMAN
DISIPLIN LEBIH DR SATU KALI SERTA
TDK TERLIBAT GERAKAN SUBVERSI / EKS
TRIM LAINNYA YG DINYATAKAN INS SECURI
TY CLEARANCE (SC) OLEH ORHAN LITPERS
POLDA/LENING POLDA/POLSAT TTK
- / FF TTK

SURAT TELEGRAM KAPOLDA JATIM**NO. POL. : ST/ /V/2001/DITPERS****TANGGAL : M E I 2001**

FF TTK **MEMPUNYAI KONDISI DAN PRESTASI KERJA SBB BINTARA DLM KEPIMPINAN YG DI NYATAKAN DLM DAPEN DGN NILAI SERENDAH-RENDAHNYA 70 ILIH KA/PIMPINAN YG BERWENANG TTK**

GG TTK **MASUK DLM DAFTAR SUSUNAN RANKING BINTARA TERPILIH PD MASING-MASING SATKER BAK DI KEWILAYAHAN MAUPUN PUSAT TTK**

HH TTK **BERSEDIA DITEMPATKAN DI SELURUH WILINDONESIA DGN MENANDATANGANI SRT PERNYATAAN HERMATERAI TTK**

II TTK **DITUNJUK DAN DIUSULKAN OLEH KA/PIMPINAN DAN DISERTAI SALINAN SRT-SRT YG BERHUBUNGAN DGN DIRI ISN (BERKAS ADM) SBB TTK/IIA**

- 1 TTK **SRT ISNAN DR KA/PIMPINAN YBS TTK**
- 2 TTK **SRT IJIN UTK MENGIKUTI SELEK SI MASUK DIK SETIKPA RES ANG KATAN XXIX DAN SETIKPA SUS POLRI TH 2001 TTK**
- 3 TTK **DAPEN DGN NILAI SERENDAH-RENDAHNYA 70 TTK**
- 4 TTK **SECURITY CLEARANCE DG ORGAN LITPERS POLDA/POLSAT TTK**
- 5 TTK **RIWAYAT HIDUP SINGKAT YG ME LIPUTI RIWAYAT DIK DAN PEKERJAAN TTK**
- 6 TTK **SALINAN/FOTO COPY SKEP PENGANGKATAN PERTAMA MENTADI POLRI TTK**
- 7 TTK **SALINAN/FOTO COPY SKEP KENAIKAN PANGKAT TERAKHIR TTK**
- 8 TTK **SALINAN/FOTO COPY KENAIKAN GAJI TERAKHIR TTK**
- 9 TTK **SALINAN/FOTO COPY SKEP JABATAN PA BAGI YG SEDANG/PERNAH MENDIRIKI JABATAN PA TTK**
- 10 TTK **SALINAN/FOTO COPY IJAZAH DIK MA REBA PK/REBA RES DAN DIK JHR YG DIMILIKI TTK**
- 11 TTK **SALINAN/FOTO COPY IJAZAH / STTB YG DIMILIKI DAN JELAH DILEHAKSIR TH 2001 TTK**
- 12 TTK **PAS FOTO UKURAN 4 X 6 SEBANYAK 7 LEMBAR TTK**
- 13 TTK **BAGI BINTARA MILWA HRS DILAMPIRKAN FOTO COPY PELEKAN SKEP MILSIKUNYA YG DILEHAKSIR OLEH KASATKERNYA TTK**
- 14 TTK **DILAMPIRKAN FOTO COPY SPRIN TUGAS OPS BAGI YG PERNAH TUGAS OPS DI DAERAH ACEH KMA MALIKU KMA TIMOL KMA IRJA KMA NTT DAN SULITENG TTK**

/ 15 TTK

4 SURAT TELEGRAM KAPOLDA JATIM
 NO. POL. : ST/ /V/2001/DITPERS
 TANGGAL : MEI 2001

- 15 TTK SRT PERNYATAAN MENGIKUTI LEX
 TDK LERAH DR TINA KAL I TER
 HITING MULAI DR TDK LERAH
 LEX UTUL S/D PANUKHIR YG DI
 KETAHUI OLEH KADIT PERS/PJBT
 PERS TTK
- 16 TTK SRT KET BEBAS NARKOBA YG DI
 BUAT OLEH DUKTER POLRI (PD
 SAAT PELAKSANAAN TEST RIKKES
 BADAN DI POLDA) TTK
- 17 TTK SRT PERNYATAAN SANGGUP DI
 TEMPATKAN DIMANA SAJA DI WIL
 RI SETELAH DIK DGN MATERAI
 RP 3000,- TTK
- 18 TTK STOPMAP 5 LEMBAR DAN SNEHEC
 TER 2 LEMBAR KMA MASING-
 MASING DGN WARNA TTKDUA
 A TTK WARNA MERAH TTK SETUK
 PA REG PRIA TTK
 B TTK WARNA HIJAU TTK SETUK
 PA REG WAN TTK
 C TTK WARNA KUNING TTK SETUK
 PA SUS PRIA TTK
- 19 TTK BERKAS PERSYARATAN ADMINIS
 TRASI MASING-MASING RANGKAP
 5 BUNDL TTK
- CCC TTK LULUS SELEKSI MSK SETUKPA REG ANGK XXIX DAN SETUKPA SUS
 POLRI TH 2001 YG MELIPUTI TTKDUA
- SATU TTK PENELITIAN PERSYARATAN ADM TTK
 DUA TTK TEST KES BADAN KMA TERMASUK TEST BEBAS
 NARKOBA TTK
 TIGA TTK TEST KESAMAPTAAN JASMANI TTK
 EMPY TTK TEST KEMAMPUAN BELADIRI POLRI TTK
 LIMA TTK MENTAL IDEOLOGI / MI (SKHP) TTK
 ENAM TTK UJIAN TERTULIS MELIPUTI TTKDUA
 AA TTK PENGETAHUAN UMUM TTK
 BB TTK PENGETAHUAN KEPULISIAN TTK
 CC TTK PERMILDAS TTK
 DD TTK BAHASA INGGRIS TTK
- DDD TTK SELEKSI TK PUSAT/TAHAP AKHIR MELIPUTI TTKDUA
- SATU TTK PENELITIAN ULANG ADM ASLI TTK
 DUA TTK TEST KESEHATAN BADAN TTK
 TIGA TTK TEST PSIKOLOGI TTK
 EMPY TTK TEST PARADE DAN WAWANCARA TTK
- EEE TTK DLM PELAKSANAAN SELEKSI MSK DIK SETUKPA REG ANGK XXIX DAN
 SETUKPA SUS POLRI TH 2001 TK DAERAH/PANDA MENGGUNAKAN SIS
 TIM GUGUR UL SISTIM GUGUR TTK

/ FFF TTK

5 SURAT TELEGRAM KAPOLDA JATIM
 NO.POL. : ST/ /V/2001/DITPERS
 TANGGAL : M E I 2001

- FFF TTK PERSYARATAN TAMBAHAN TTKDUA
- SATU TTK DIUTAMAKAN TTKDUA
- AA TTK PERNAH MENGIKUTI/MEMILIKI IJAZAH/SER
 TIFIKAT KHUSUS KEJURUAN MIN DUA HLN
 TTK
- BB TTK TLH MENDUDUKI JAB PERWIRA MIN ENAM
 HLN DIRBUKTIKAN DGN SKEP KAPOLDA TTK
- CC TTK BERTUGAS DI BID OPS ATAU LEMBAGA PEN
 DIDIKAN TTK
- DUA TTK PENGETRAPAN TALENT SCOUTING BAGI CLN SISWA YG
 MEMILIKI TTKDUA
- AA TTK IJAZAH SARJANA/SARMUD BAGI KASIS SE
 TUKPA SIS POLRI TH 2001 TTK
- BB TTK SKEP YG SEDANG MENDUDUKI JAB KAPOL
 SEK MIN ENAM HLN DIRBUKTIKAN DGN FOTO
 COPY SKEP KAPOLDA YG TLH DILEGALISIR
 PAKSI PERS BAGI KASIS SETUKPA REG POL
 RI TTK
- CC TTK KETERANGAN PERNAH MELAKS/MENGIKUTI
 PENUGASAN KHUSUS/JIAR MENGERI ATAU KE
 KARYAAN DI BID EKSEKUTIF/LEGISLATIF
 (FOTO COPY DILEGALISIR PEJANAT PERS)
 TTK
- GGG TTK ADAPUN JADWAL WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN UJIAN/SELEKSI MSK
 DIK SETUKPA REG ANGG XXIX DAN SETUKPA SIS POLRI TH 2001
 ADLH SBB TTKDUA
- SATU TTK PENDAFTARAN DAN RIKMIN DIATUR SBB TTKDUA
- AA TTK TGL 25 MEI 2001 UTK POLWIL MALANG
 DAN JAJARAN TTK
- BB TTK TGL 28 MEI 2001 UTK POLWIL BESUKI
 DAN JAJARAN TTK
- CC TTK TGL 29 MEI 2001 UTK POLWIL KEDIRI
 DAN JAJARAN TTK
- DD TTK TGL 30 MEI 2001 UTK POLWIL BOJONE
 GORO DAN JAJARAN TTK
- EE TTK TGL 31 MEI 2001 UTK POLWIL MADIUN
 DAN JAJARAN TTK
- FF TTK TGL 1 JUNI 2001 UTK POLWIL MADURA
 DAN JAJARAN TTK
- GG TTK TGL 5 JUNI 2001 UTK POLWIL SURABAYA
 DAN JAJARAN TTK
- HH TTK TGL 6 JUNI 2001 UTK POLWIL TABES
 SURABAYA DAN JAJARAN TTK
- II TTK TGL 7 JUNI 2001 UTK KAPOLDA JATIM
 KMA PUSDIK SANNARA DAN BRIMOB LEMDIK
 LAT PIRI TTK
- DUA TTK TGL 29-5-2001 S/D 8-6-2001 KMA TEST RIKKES
 BADAN DAN BERAS NARKOBA TTK

/ TIGA TTK

6 SURAT TELEGRAM KAPOLDA JATIM
 NO.POL. : ST/ /V/2001/DITPERS
 TANGGAL : M E I 2001

TIGA TTK TGL 31-5-2001 S/D 11-6-2001 KMA TEST KESAMAP
 TAAN JASMANI DAN BELADIRI TTK

EMPT TTK TGL 13-6-2001 KMA PENGUNJUMAN HASIL TEST KESA
 MATAAN JASMANI DAN BELADIRI TTK

LIMA TTK TGL 14-6-2001 S/D 16-6-2001 KMA TEST MI TTK

ENAM TTK TGL 19-6-2001 KMA PENGUNJUMAN HASIL TEST MI
 TTK

TUJUH TTK TGL 11 DAN 12-7-2001 KMA PELAKS UJIAN TER
 TULIS MELIPUTI TTKJUA
 AA TTK PENGETAHUAN UMUM TTK
 BB TTK PENGETAHUAN KEPOLISIAN TTK
 CC TTK PERMUDAAS TTK
 DD TTK BAHASA INGGRIS TTK

DLPN TTK TGL 4-8-2001 KMA PENGUNJUMAN LULUS/TKD LULUS
 SELEKSI/UJIAN TK PUSAT HAP I TTK

SBLN TTK TGL 18-8-2001 CASIS TIBA DI SECAPA LEMDIKLAT
 PUORI SUKABUMI PALING LAMBAT PKL 20.00 WIB
 TTK

SPLH TTK TGL 21 S/D 29-8-2001 KMA PELAKSANAAN SELEKSI
 TK PUSAT HAP II DI SECAPA LEMDIKLAT PUORI
 SUKABUMI MELIPUTI TTKJUA
 AA TTK PENELITIAN ULANG ADM ASLI TTK
 BB TTK TEST KESEHATAN BADAN TTK
 CC TTK TEST PSIKOLOGI TTK
 DD TTK TEST PARADE DAN WAWANCARA TTK

HHH TTK KETENTUAN PENDAFTARAN PARA CALON DATANG SENDIRI ATAU SEGA
 RA KOLEKTIF DGN MEMBWA SRT PENGANTAR DR PIMPINAN SRTA
 PERSYARATAN ADM LENGKAP SEHAGAIMANA PD BUTIR BBB ANGKA
 TIGA HURUF II TSB DIATAS DAN SESUAI JADWAL YG ILH DITENTU
 KAN TTK

III TTK UTK MENGHINDARI TERULANGNYA KEMBALI PARA BINTARA YG MEMILI
 KI PERMASALAHAN ATAU TUNGGAKAN PERKARA DPT LULUS MENGIKUTI
 DIK KMA DLM PRSES PENGUSULAN AGR KA/DAN MENGADAKAN PENELI
 TIAN SEWAKA BELUKI TTK

JJJ TTK DIINGATKAN KEMBALI BHW SESUAI DGN SRT TELEGRAM KAPOLRI NO
 POL : ST/18/2000 TGL 14 FEBRUARI 2000 DITEGASKAN BHW KPD
 SEMUA PIHAK TIK TIDAK BERTINDAK SELAKU SPONSORSHIP MAJLIS
 MELAKUKAN UPAYA-UPAYA DLM BENTUK LAIN YG DPT MEMPENGARHI
 PRSES SELEKSI YG DLAKSANAKAN OLEH PANDA TTK

/ KKK TTK

7 SURAT TELEGRAM KAPOLDA JATIM
NO.POL. : ST/ /V/2001/DITPERS
TANGGAL : M E I 2001

KKK TTK DITEGASKAN PULA BHW SESUAI SKEP KAPOLRI NOPOL SKEP/1353/X/
2000 TH. 19-10-2000 KMA TIS PEMBATASAN LEKDIK SEHANYAK
TIGA KALI TERBUKUNG MULAI DR DOK LULUS LEK TITUL S/D LEK
PANTIKTOR SIG APABILA DITEMUKAN HAL-HAL YG DOK SESUAI DGN
SKEP TSB AGAR DOK DIKUHERTAKAN LEK (GURUR) DAN HARI YG
MEMENUHI SYARAT AGAR DIKUATKAN DGN SRT PERNYATAAN YG DI
KETAHUI OLEH PEJABAT PERS TTK

LLL TTK DUMM TTK HBS

AN KAPOLDA JATIM
KADIT PERS

RIDWAN AMIN_____
KIMHES POL NRP 47120207



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR

SURAT - TELEGRAM

D A R I : KAPOLDA JATIM DERAJAT : KILAT

K E P A D A : 1. IRPOLDA JATIM KLASIFIKASI : BIASA

2. KA PUSKODALOPS POLDA JATIM
3. ASRENA KAPOLDA JATIM
4. PARA KADIT POLDA JATIM
5. KAPOLWIL TABES SBY
6. KAPOLWIL SEJATIM
7. DANSAT BRIMOBDA JATIM
8. KA PUSDIK BRIMOB DAN KA PUSDIK SABHARA
LEMDIKLAT POLRI
9. KADIS DOKKES KMA KADIS KUM KMA KA KU DAN
KAPUSKOP POLDA JATIM
10. KA LABFOR CAB SBY
11. KAPOLRESTA DAN KAPOLRES SEJATIM
12. KASAT POLAIRUD POLDA JATIM
13. PARA KADEN DAN KADIS POLDA JATIM
14. KA SPN MOJOKERTO KMA KASETUM DAN KA KOORD SPRIPIM
POLDA JATIM

TEMBUSAN : 1. ASPERS KAPOLRI
2. KAPOLDA JATIM
3. DIR MINPERS POLRI
4. KASUBDIT LEKDIK DITMINPERS POLRI

N O P O L : ST/ /VI/2001/DITPERS TGL - 6 - 2001

AAA TTK REF SRT TELEGRAM KAPOLRI NOPOL : ST/460/VI/2001 TGL 12-6-2001 TIG SELEKSI ALIH GOL DR TA KE BA POLRI TA 2001 TTK

BBB TTK SEHUB DGN HAL TSB DIATAS KMA DGN INI DIBRIHKAN AKAN DI LAKSANAKAN SELEKSI DLM RANGKA ALIH GOL DARI TA MENJADI BA POLRI DGN PERSYARATAN SBB TTKDUA :

/ SATU TTK

2 SURAT TELEGRAM KAPOLDA JATIM
 NO. PDL. : ST/ /VI/2001/DITPERS
 TANGGAL : JUNI 2001

SATU TTK PERSYARATAN UMUM TTKDUA

- AA TTK TA POLRI DGN DIKUM SLIP/SEDERAJAT BERPANGKAT MINIMAL AJUN BRIGADIR POLISI (ABRIP) TTK
- BB TTK TA POLRI DGN DIKUM SLTA/SEDERAJAT BERPANGKAT MINIMAL AJUN BRIGADIR POLISI SATU (ABRPTU) TTK
- CC TTK LEGALISASI IJAZAH DIKUM OLEH KANWIL DEPDIKNAS TTK APABILA IJAZAH DIKUM HILANG MELAMPIRKAN LAPORAN KEHILANGAN KMA SRT KEI DR SEKILAH YBS DAN SRT KEI DR KANWIL DEPDIKNAS TEMPAT SEKOLAH YBS DAN PENGESAHAN DR PIHT YG BERWENANG TTK
- DD TTK BERMENTAL BAIK DAN TDK TERLIBAT BERAKAN SUBVERSI/EKSTREM LAINNYA YG DINYATAKAN DLM SECURITY CLEARANCE (SC) OLEH LITPERS POLDA TTK
- EE TTK BERPRESTASI DAN BERKONDITE BAIK KMA YG DINYATAKAN DLM DAPEN DGN NILAI SERENDAH-RENDAHNYA 70 (TUJUH PULUH) OLEH KEPALA / PIMP YG BERWENANG TTK

DUA TTK PERSYARATAN LAIN YG BERLAKU UTK SELEKSI ALIH GOLONGAN TA KE BA POLRI ADALAH MENGIKUTI DAN LULUS UJIAN/PEMERIKSAAN YG MELIPUTI TTK DUA

- AA TTK PEMERIKSAAN KELENGKAPAN PERSYARATAN ADM TTK
- BB TTK PEMERIKSAAN KESEHATAN BADAN TTK
- CC TTK TES KESAMAPTAAN JASMANI TTK
- DD TTK PENELITIAN PERSONEL / MI TTK
- EE TTK TES PSIKOLOGI TTK
- FF TTK TES UJIAN TERTULIS (UTUL) TTK
- GG TTK DITUNJUK DAN DIUSULKAN OLEH KA/PIMPINAN DGN DIISERTAI SALINAN SRT-SRT YG BERHUB DGN DIRI GUN (BERKAS ADM) SBB TTKDUA
 - A TTK SRT ISUIAN DR KA/ PIMPINAN
 - B TTK SRT LAIN UTK MENGIKUTI SELEKSI ALIH GOL DR TA KE BA POLRI TTK
 - C TTK DAPEN DGN NILAI SERENDAH - RENDAHNYA 70 TTK

/ D TTK

3 SURAT TELEGRAM KAPOLDA JATIM
NO.POL. : ST/ /VI/DITPERS
TANGGAL : JUNI 2001

- D TTK SECURITY CLEARANCE DARI ORGAN DITPERS POLDA / POLSAT ITK
- E TTK RIWAYAT HIDUP SINGKAT YG MELIPUTI RIWAYAT DIK DAN PEKERJAAN TTK
- F TTK SALINAN/FOTO COPY SKEP PENANGKATAN PERTAMA MENJADI POLRI TTK
- G TTK SALINAN/FOTO COPY SKEP KE NAIKAN PINGKAT TERAKHIR TTK
- H TTK SALINAN/FOTO COPY KENAIKAN GATI TERAKHIR TTK
- I TTK SALINAN/FOTO COPY IJAZAH DIKMA TA PK DAN DIKHIR YG DIMILIKI TTK
- J TTK SALINAN/FOTO COPY IJAZAH/STTB YG DIMILIKI DAN ILH DILEGALISIR IH 2001 TTK
- K TTK PAS FOTO BERNARNA PAKAIAN PDH UKURAN 4X6 CM SEBANYAK LIMA(5) LEMBAR TTK
- L TTK DILAMPIRKAN FOTO COPY SPRIN INS UPS BG YG PERNAH INS UPS DI DAERAH OPERASI TTK
- M TTK SRT KETERANGAN BEBAS NARKOBA YG DIBUAT OLEH DOKTER POLRI TTK

TIGA TTK PERSYARATAN TAMBAHAN TTKDUA

- AA TTK DIUTAMAKAN CALON YG PERNAH MENGIKUTI DIKJUR DAN LAMA DIK MINIMAL DUA BLN YG DIBUKTIKAN DAN IJAZAH TTK
- BB TTK MERUPAKAN TALENT SCOUTING BG CLN PESERTA TTKDUA
- A TTK MEMILIKI IJAZAH S-1/D-III (DILEGALISASIKAN DEKAN) TTK
- B TTK PERNAH MENGIKUTI GASSUS KELUAR NEGERI ATAU PERNAH /SEDANG MENDUDUKI JABATAN LURAH/KADES TTK

/ C TTK

4 SURAT TELEGRAM KAPOLDA JATIM
NO.PO. : ST/ /2001/DITPER
TANGGAL : JUNI 2001

C TTK MEMILIKI BINTANG BHAYANG
KARA NARARYA KMA SL KE
SAIKIA TANTAMA DAN SL
KARYA BHAKTI TTK

CCC TTK PELAKSANAAN SELEKSI ALIH GOL DR TA KE BA POLRI TH 2001
MENGUNAKAN SISTIM BUBUR UL SISTIM BUBUR DLM SETIAP TAHAP
PELAKSANAAN SELEKSI TTK

DDD TTT ADAPUN JADWAL PELAKS GIAT UJIAN/SELEKSI ALIH GOL DR TA KE
BA POLRI TH 2001 SBB TTKDUA

SATU TTK BLN JUNI S/D AGUSTUS 2001 GIAT TK PANDA TTK
DUA TTK TGL 3-10-2001 PELAKS UJIAN TERTULIS ETIKA
KEPOLISIAN TTK

TIGA TTK TGL 22-10-2001 PENGUMUMAN LULUS / TDK LULUS
SELEKSI/UJIAN OLEH PANPUS TTK

EMPT TTK TGL 1-1-2002 PELANTIKAN/KORPS RAPORT KENAIK
AN PANGKAT KE BRIPDA TTK

EEE TTK ST INI BERSIFAT WARNING DAN DIHARAP TSB ALAMAT SGR MENDATA
ULANG ANGGOTANYA MASING-MASING YG MEMENUHI SYARAT DAN ME
MERINTAHKAN YBS UTK MEMPERSIAPKAN KELENGKAPAN PERSYARATAN
ADM NYA TTK

FFF TTK DUMP TTK HBS

AN KAPOLDA JATIM
KADIT PERS

RIWAN AMIN
KOMRES POL NRP 47120/207



PENGUMUMAN NO. POL : PENG 102 / IV / 2001

Tentang

PENERIMAAN CALON TARUNA AKADEMI KEPOLISIAN TAHUN ANGGARAN 2001

I. Dasar :

- a. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : Skep / 543 / IV / 2001 tanggal 17 - 04 - 2001 tentang Penerimaan Taruna Akademi Kepolisian Tahun Anggaran 2001.
- b. Surat Telegram Kepala Kepolisian No. Pol : ST / 291 / IV / 2001 tanggal 20 April 2001 tentang Jadwal Penerimaan Taruna ANPOL T.A. 2001.

2. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini diumumkan bahwa KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR (Polda Jatim) memberikan kesempatan kepada para Pemuda dalam wilayah Jawa Timur, untuk dididik menjadi Taruna Akademi Kepolisian T.A 2001.

Persyaratan umum yang harus dipenuhi :

- a. Warga Negara Indonesia (pria)
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- c. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945
- d. Berkelakuan baik yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB) dari Polres setempat.
- e. Berbadan sehat (sehat Jasmani dan rohani) visus mata normal
- f. Tidak kehilangan hak untuk menjadi anggota Polri
- g. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
- h. Persyaratan lain meliputi :
 - 1) Umur pada saat masuk Pendidikan bulan Agustus 2001 :
 - (a) Umum : Minimal 18 Tahun, Maximal 22 Tahun
 - (b) Bintara Polri : Maximal 24 Tahun.
 - 2) Tinggi Badan Minimal 165 Cm dengan Berat Badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku.
 - 3) Belum pernah kawin dan sanggup tidak kawin selama dalam pendidikan Pertama.
 - 4) Bersedia menjalankan Ikatan Dinas Pertama selama 10 Tahun terhitung mulai saat dilantik menjadi Perwira Polri.
 - 5) Memperoleh persetujuan Orang Tua / Wali.
 - 6) Berijazah SMU / Madrasah Aliyah / Bintara Polri :
 - (a) Nem Rata-rata untuk SMU / Madrasah Aliyah Minimal 5,5 (lima koma lima) Untuk Program IPA (A1 dan A2), minimal 6,5 (enam koma lima) Untuk Program IPS (A3).
 - (b) Bagi calon yang masih duduk di kelas III SMU / Madrasah Aliyah dapat menunjukkan Surat dari Kepala Sekolah dan Raport terakhir dengan nilai rata-rata 7 (tujuh) dengan ketentuan Nem pada saat lulus sesuai dengan yang tercantum pada angka 6, (a) diatas.
 - (c) Untuk Bintara Polri :

/ (1) Berijazah

- (1) Berijazah SMU / Madrasah Aliyah.
 - (2) Memiliki Nilai rata-rata dengan batas Minimal sama dengan persyaratan Nilai yang ditetapkan bagi calon dari umum.
 - (3) Telah memiliki masa Dinas sekurang-kurangnya 2 Tahun.
 - (4) Dapen Serendah – rendahnya 75 (tujuh puluh lima) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- 7) Bagi yang sudah bekerja secara tetap sebagai Pegawai / Karyawan / Bintara Polri :
- (a) Surat Persetujuan / Rekomendasi dari Kepala Jawatan / Instansi / Kasatker yang bersangkutan.
 - (b) Bersedia diberhentikan dari status Pegawai / Bintara Polri bila diterima dan mengikuti pendidikan sebagai TARUNA AKPOL.
- 8) Mengikuti dan lulus ujian / Pemeriksaan yang meliputi :
- (a) Kelengkapan persyaratan Administrasi
 - (b) Parade / Peragaan
 - (c) Kesehatan Badan
 - (d) Test Kesamaptan Jasmani
 - (e) Penelitian Khusus Mental Idiologi
 - (f) Psikologi
 - (g) Akademik Untuk :
- (1) SMU / Madrasah Aliyah :
 - IPA (A1 & A2) Pengetahuan Umum, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Fisika, Kimia, Matematika.
 - IPS (A3) Pengetahuan Umum, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Ekonomi, Sosiologi, Matematika.
 - (2) Bintara Polri : Pengetahuan Umum, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Sosiologi, KUHP / KUHAP.
- 9) Diutamakan calon Siswa yang memiliki :
- (a) Prestasi ILPENGTEK / Olah raga tingkat nasional.
 - (b) Kualifikasi Paskibraka tingkat nasional.
 - (c) Kemahiran / Ketrampilan Programmer / Analis Komputer.
 - (d) Ketrampilan Beladiri setingkat Dan / Kyu-I.
 - (e) Kualifikasi mahir dasar I Pramuka.

Tersebut huruf (a) s.d (e) diatas agar melampirkan foto Copy sertifikat / piagam / penghargaan yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

2. Tempat Pendaftaran dan ketentuan untuk mendaftar :

- a. Tempat Pendaftaran terpusat di Mapolda Jatim (sebagai Panda) Jl. Jenderal A. Yani Wonocolo No. 116 Surabaya
- b. Peserta / Pendaftar harus datang sendiri ke tempat pendaftaran dengan membawa :
 - 1) Ijasah Asli / STTB (SD, SMP, SMU/ Sederajat) dan Nilai SMU/ MA.
 - 2) Asli Akte / Kenal lahir dari Bupati / Wali Kota
 - 3) Asli SKKB dari Polres dan KTP Asli
 - 4) Pas Photo hitam putih ukuran 4 x 6 Cm sebanyak 7 lembar
 - 5) Stop Map Warna kuning 3 lembar
 Bagi Anggota Polri selain tersebut diatas harus membawa KTA asli dan surat keterangan / Rekomendasi dari Kasatker.

/ 4 Pendaftaran

4. Pendaftaran dibuka pada tanggal, 23 *April 2001* dan ditutup pada tanggal, 23 *Mei 2001* pukul 14.00 Wib.
5. Hal lain yang berkaitan dengan persyaratan, jadwal kegiatan ujian dan kelengkapan Administrasi penerimaan calon TARUNA AKPOL T.A. 2001 yang belum diatur dalam Pengumuman ini akan diinformasikan lebih lanjut oleh Panitia.
6. Demikian untuk menjadikan maklum.

Dikeluarkan di : Surabaya
Pada tanggal : 1 April 2001

An. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR
KADIT PERS



RIDWAN AMIN

KOMBES POL NRP. 47120207



P E N G U M U M A N

No. Pol : PENG / 03 / XI / 2001

Tentang

**PENERIMAAN PERWIRA POLRI SUMBER SARJANA
S-1 DAN D-3 PRIA / WANITA
TAHUN 2002**

1. Dasar :

- a.) Surat Telegram Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nopol. : ST / 853 / X / 2001 tgl. 12- 10 - 2001 tentang Kampanye penerimaan Perwira POLRI Sumber Sarjana S-1 dan D-3 Pria / Wanita Tahun 2002
- b.) Telegram Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nopol. : ST / 905 / XI / 2001 tgl. 09 - 11 - 2001 tentang persyaratan penerimaan Perwira POLRI Sumber Sarjana S-1 dan D-3 Pria / Wanita Tahun 2002
- c.) Skep Kepala kepolisian Republik Indonesia Nopol. : Skep / 1578 / XI / 2001 tanggal, 08 Nopember 2001 tentang persyaratan kelulusan penerimaan Perwira Polri Sumber Sarjana D - 3 dan S-I.T.A. 2002

2. Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini diumumkan bahwa KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR (POLDA JATIM) akan memberikan kesempatan kepada para Pemuda dan Perempuan dalam Wilayah Jawa Timur untuk dididik menjadi PERWIRA POLRI

3. Adapun persyaratan umum yang harus dipenuhi :

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Setia dan Taat kepada Pancasila dan UUD 1945.
- d. Berumur maksimal 24 tahun bagi D-3, 30 tahun bagi S-1 dan 31 untuk Sarjana Kedokteran / Psi / Apoteker pada saat buka Pendidikan.
- e. Berkelakuan Baik yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB) dari Polres setempat.
- f. Sehat jasmani dan rohani.
- g. Tidak kehilangan Hak untuk menjadi anggota POLRI.
- h. Ijazah Profesi Sarjana (S-1) dan D-3 Negeri dan Swasta dengan IPK tidak kurang dari :

- 1) 2,70 untuk Profesi / S-1 lain
- 2) 2,10 untuk Sarjana Kedokteran
- 3) 2,25 untuk Sarjana Psi, Farmasi/Apoteker, Mipa dan Teknik.
- 4) 2,50 untuk Program D-3

i. Sarjana yang dibutuhkan :

1) Kelompok : S - 1

- | | | |
|------------------|---------|----------------|
| (a) KEDOKTERAN : | - UMUM | (Pria) |
| | - GIGI | (Pria / Wan) |
| | - HEWAN | () |

.....

- (b) PSIKOLOGI : (Pria)
- (c) MIPA : - FARMASI / APOTEKER (Pria)
- KIMIA (Pria)
- FISIKA (Pria)
- BIOLOGI (Pria)
- STATISTIK (Pria)
- (d) KOMPUTER : - MANAJEMEN INFORMATIKA (Pria / Wanita)
- TEKNIK INFORMATIKA (Pria / Wanita)
- TEKNIK KOMPUTER (Pria)
- (e) TEKNIK : - TEK. KIMIA (Pria)
- TEK. FISIKA (Pria)
- TEK. ELEKTRO (Arus kuat/Lemah) (Pria)
- TEK. LISTRIK (Listrik) (Pria)
- TEK. METALURGI (Pria)
- KOMPLEK (Pria)
- (f) FISIP/SOSPOL : - ILMU HUB INTERNASIONAL (Pria)
- SOSIOLOGI (Pria)
- KRIMINOLOGI (Pria)
- ILMU POLITIK / PEMERINTAHAN (Pria)
- KOMUNIKASI/PUBLISISTIK (Pria)
- ADMINISTRASI/KEARSIPAN (Pria)
- ADMINISTRASI NEGARA (Pria)
- SEJARAH (Pria)
- PERPUSTAKAAN (Pria)
- (g) ILMU HUKUM : (Pria / Wanita)
- (h) EKONOMI : - AKUTANSI (Pria / Wanita)
- MANAJEMEN KEUANGAN (Pria / Wanita)
- PERBANKAN (Pria / Wanita)
- KOPERASI (Pria)
- (i) SASTRA : - BHS. INGGRIS (Pria)
- BHS. MANDARIN / CINA (Pria)
- BHS. JEPANG (Pria)
- BHS. JERMAN (Pria)
- BHS. PERANCIS (Pria)
- BHS. ARAB (Pria)
- (j) AGAMA : - ISLAM / DA'WAH (Pria)
- ISLAM / SYARIAH (Pria)
- KRISTEN PROTESTAN (Pria)
- KRISTEN KATHOLIK (Pria)
- HINDU (Pria)
- BUDHA (Pria)
- (k) PENDIDIKAN : - OLAH RAGA (Anto Pometis) (Pria)
- OLAH RAGA KESEHATAN (Pria)
- KURIKULUM PENDIDIKAN (Pria / Wanita)

12. Kelompok

2) Kelompok : D-3

(a) KESEHATAN	- PERAWAT / AKPER (Pria / Wan) - ANESTESI / AKNES (Pria) - FISIOTERAPI / AKFIS (Pria) - PENATA RONGENT / APRO (Pria) - GIZI / AKZI (Pria) - AKL (Pria) - ATEM (Pria) - TEHNIK (Pria) - ANALIS KEMIA (Pria) - ANALIS KESEHATAN / MEDIS (Pria)
(b) KOMPUTER	- MANAJ INFORMATIKA (Pria) - TEKNIK INFORMATIKA (Pria / Wan) - TEKNIK KOMPUTER (Pria)
(c) TEKNE	- TEKNIK AHLI MESIN KAPAL / AM (Pria)
(d) FISIP/SOSPOL :	- ADMINISTRASI/KEARSIPAN (Pria) - PERPUSTAKAAN (Wan)
(e) EKONOMI :	- AKUNTANSI (Pria / Wan) - MANAGEMENT KEUANGAN (Pria / Wan) - PERBANKAN (Pria / Wan)
(f) SASTRA :	- BHS. INGGRIS (Pria) - BHS. MANDARIN CINA (Pria)
(g) KELAUTAN / AIP :	- NAUTIKA (Pria) - PELAYARAN / AIP (Pria) - MPE BI (Pria)
(j) SANDI NEGARA :	(Pria)

j. Lolus Ujian Negara : (Ijasah dilegalisir oleh Kopertis)

k. Tinggi Badan Minimal :

- 1) 160 cm untuk Calon PA POLRI PRIA
- 2) 155 cm untuk Calon PA POLRI WANITA

l. Belum pernah kawin dan sanggup tidak kawin selama dalam pendidikan dan dituntut (satu) tahun setelah Pangkat pada Pol.

m. Bersedia menjalankan dinas Perwira sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.

n. Dapat persetujuan dari instansi yang bersangkutan bagi yang kerja dan perawatannya sesuai dengan hormat bila masuk Pendidikan.

o. Bersedia ditempatkan di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia.

p. Tidak Terikat perjanjian Ikatan Dinas dengan suatu Instansi lain.

q. Memperoleh persetujuan dari orang tua / wali.

4. Tempat Pendaftaran dan ketentuan untuk mendaftar :

- a. Mapolda Jatim Jl. Achmad Yani No. 116 Wonocolo Surabaya Gedung Bhakti Seti III Ruang 109 (Subbag Rim Bag Rendiaga)

/b. Peserta.....

4

PENGUMUMAN KAPOLDA JATIM
NO.POL : PENG/03 / XI / 2001
TANGGAL : 9 - 11 - 2001

b. Peserta/pendaftar harus datang sendiri ke tempat pendaftaran dengan membawa dokumen asli dan masing-masing foto copy rangkap tiga :

- 1) Ijazah SD, SLTP, SLTA, D-III, S-I Negeri dan Swasta.
- 2) Daftar Prestasi Kumulatif (DPK)
- 3) Akte/Kenal lahir dari Bupati/Walikota.
- 4) SKKB dari Polres.
- 5) KTP Calon (domisili di Wilayah Jatim).
- 6) KTP Orang tua/Wali.
- 7) KK (kartu keluarga).
- 8) Pas Photo hitam putih uk. 4 X 6 sebanyak 10 lembar
- 9) Stopmap Warna hitam 3 lembar dan stopmap snal harter warna merah 2 lembar
- 10) Memenuhi syarat tinggi badan yang diukur oleh Panitia.

Waktu Pendaftaran.

Pendaftaran dibuka pada tanggal 12 Nopember 2001 dan ditutup pada tanggal 13 Nopember 2001. Pukul 12.000 wib.

Hal lain yang berhubungan dengan jadwal kegiatan Ujian dan kelengkapan Administrasi akan diumumkan langsung kepada para peserta saat pembagian Blangko Persyaratan Administrasi.

Demikian untuk menjadi maklum.

Dikeluarkan di : Surabaya
Pada tanggal : 9 Nopember 2001

A.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR
KEPALA DIREKTORAT PERSONEL

